



Provinsi Kalimantan Tengah

indonesia



MODEL PARIWISATA PRUDEN

Dari Pemikiran Menuju Penerapan



Fransiskus Handoko, SST.Par., M.Sc
Dr. Stepanus, S.Hut., MP

**Ketentuan Hukum Pidana Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODEL PARIWISATA PRUDEN

Dari Pemikiran Menuju Penerapan

Fransiskus Handoko, SST.Par., M.Sc
Dr.Stepanus, S.Hut., MP



MODEL PARIWISATA PRUDEN

Dari Pemikiran Menuju Penerapan

Fransiskus Handoko, SST.Par., M.Sc
Dr.Stepanus, S.Hut., MP

Copyright © Dandelion Publisher

Cetakan Pertama: November 2020
Editor: Dian Ikha Pramayanti
Tata Letak Sampul dan Isi: Tim Redaksi
Ilustrator: Tim Redaksi

ISBN: 978-623-6696-89-7
xii + 99 halaman: 18,2 x 25,7 cm



Diterbitkan Oleh:
CV. Dandelion Publisher
Anggota IKAPI No. 350/JBA/2020
Taman Kenari Jagorawi
Citeureup, Bogor, Jawa Barat
0812 6111 765
dandelionpublisher@gmail.com
www.dandelionpublisher.com

Sekapur Sirih



Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita telah melaksanakan Seminar Online Trik Jitu Menulis dan Menerbitkan Buku Ilmiah Populer, yang berlanjut pada penulisan produk buku. Program ini diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah yang berkolaborasi

Dandelion Publisher.

Kegiatan literasi ini diharapkan mampu menyebarkan banyak kebaikan. Sebab karya dalam bentuk tulisan dapat menjadi media komunikasi ide, pengalaman, ilmu, serta hikmah. Baik secara personal, kelompok, masyarakat, bangsa, hingga lintas generasi dan budaya.

Semua profesi bisa menuangkan karya dalam bentuk tulisan. Terlebih rekan-rekan yang memiliki banyak pemikiran dan ide positif sangat dianjurkan mengabadikannya melalui tulisan agar lebih luas manfaatnya. Sebagaimana pepatah mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Publikasikan ide dan pemikiran hingga dunia dapat mengambil manfaat dari kita.

Selamat berkarya, sebarkan manfaat pada pada pembaca di manapun berada.

Kalimantan Tengah, Agustus 2020

Sri Widarnani, S.IP., M.Si.

(Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Kalimantan Tengah)

Sambutan

Kepala PPSDM Kemenparekraf



“Buku ini membahas dari sebuah pemikiran teoritik sejumlah ahli dan pakar yang ada, bahkan kebijakan pemerintah dan stakeholders yang bergelut dibidang pariwisata subsistemnya, yang kemudian oleh penulis diramu menjadi sebuah penjelasan ringan dan praktis agar dapat lebih mudah diterapkan.

Barangkali sedikit orang menyadari bahwasanya peran pariwisata tidak berkutat soal sosial ekonomi, pemenuhan hajat hidup ekonomi belaka, namun jauh lebih lanjut peran pariwisata dan subsistem yang terdapat didalamnya merupakan komposit yang memberikan implikasi tonik yang lebih berdaya guna jika dipahami dan diterapkan sesuai kaidah-kaidah keilmuan yang benar.

Kemanfaatan pariwisata yang dijelaskan dalam buku yakni menjelaskan bahwa pariwisata merupakan sebuah panacea yang juga memiliki ruang kontribusi positif bagi pelestarian budaya, alam flora dan fauna itu sendiri, yakni sebagai wahana konservasi, preservasi, edukasi dan rekreasi jika diterapkan dengan pruden.

Pada sisi lainya saudara penulis mengupas secara lengkap pemikirannya dengan melihat perspektif pariwisata dari ekosistem pendukungnya, dengan praktik baik dari pelestarian ekosistem lingkungan hutan yang bersinergis dengan pembangunan pariwisata

Dengan membaca buku Saudara Fransiskus Handoko dan Stepanus ini, kita menjadi memiliki pemahaman holistik dan implementatif dan tergerak untuk mendorong pihak-pihak terkait untuk mendayagunakan segala potensi kekayaan pariwisata dan ekosistem pendukung bagi kejayaan negara kita Indonesia”

Dr. Anggara Hayun Anujprana, ST., MT

(Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena buku **Model Pariwisata Pruden dari Pemikiran Menuju Penerapan** telah selesai. Buku ini disusun dimaksudkan untuk melihat perspektif lain pariwisata dari struktur komposit alam, sosial dan ekonomi masyarakat yang satu sama lain saling terkait. Adalah pariwisata diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjelma menjadi (Tourism Sustainability Development) bagian dari hak azasi manusia. Pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri dalam pengembangan industri pariwisata karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik itu dalam bidang kapital, sumber daya manusia (SDM) ataupun bidang manajemennya.

Pariwisata yang baik tentunya memiliki destinasi yang berkualitas untuk dikunjungi, juga memiliki unsur komponen penopang yang kuat SDM, aksesibilitas dan Amenitas, sehingga keberlanjutan destinasi tersebut dikunjungi oleh wisatawan tetap lestari. Keberadaan atraksi sebagai menu utama harus juga ditopang dengan penyediaan SDM mumpuni, fasilitas serta kemudahan akses menuju kelokasi di mana destinasi wisata tersebut berada.

Kesejahteraan manusia dan kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada perbaikan cara mengelola ekosistem untuk memastikan tercapainya konservasi ekosistem dan pemanfaatan yang lestari. Pada saat kebutuhan terhadap jasa ekosistem seperti pangan dan air bersih meningkat, pada waktu yang bersamaan kegiatan manusia telah menyebabkan menurunnya kemampuan berbagai ekosistem untuk memenuhi kebutuhan ini. Intervensi kebijakan dan pengelolaan seringkali dapat memulihkan ekosistem yang terdegradasi.

Ekosistem yang tertata dengan baik akan mengurangi risiko dan kerentanan, sementara ekosistem yang tidak dikelola dengan baik akan membahayakan manusia karena mempertinggi risiko terjadinya banjir, kekeringan, kegagalan panen pertanian atau penyakit.

Perlindungan hutan merupakan suatu upaya untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan hutan dari berbagai gangguan yang

dapat mengganggu dan merusak sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti flora dan fauna, biota laut, ekosistem, habitat, tata air dan lain-lain. Perlindungan hutan hanya mungkin dilaksanakan jika direncanakan dengan baik dan benar dengan mengakomodir dan merefleksikan potensi atau daya dukung dari sumberdaya hutan yang menjadi objek perlindungan.

Dengan pemahaman bahwa sumberdaya hutan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari suatu ekosistem bentang alam, maka potensi ataupun daya dukung dari sumberdaya hutan tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dalam konteks keterkaitannya dengan ekosistem lain yang dapat dipengaruhi dan atau dapat memengaruhinya. Sehubungan dengan itu pula, perlindungan hutan sejatinya dilandasi dengan pemahaman atau pengetahuan tentang kondisi ekosistem bentang alam di mana hutan yang menjadi objek perlindungan hutan. Pemahaman atau pengetahuan termaksud harus didasarkan pada hasil penelurusan secara menyeluruh dan hasil analisis yang seksama terhadap komponen-komponen ekosistem hutan. Demikian sekilas gambaran isi yang selanjutnya akan dikupas tuntas didalam buku ini.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada Ibu Dra Ni Wayan Giri Adnyani M.Sc.,CHE selaku Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonom Kreatif, Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Anggara Hayun Anujuprana, ST., M.T selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonom Kreatif. Ucapan terimakasih kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Sri Widanarni, S.IP., M.Si.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan penghargaan kepada penerbit Dandelion yang bersedia menerbitkan buku ini. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang sudah ikut membantu dalam proses penyelesaian buku ini.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pemerhati Pariwisata alam maupun semua pihak yang membutuhkan.

Daftar Isi

Sekapur Sirih	v
Sambutan Kepala PPSDM Kemenparekraf	vi
Kata Pengantar	vii
BAB I Performansi Pariwisata	1
1.1 Pariwisata Instrumen Alternatif	1
1.2 Capaian Pariwisata	3
1.3 Kepentingan dalam Pariwisata	8
1.4 Amunisi Pariwisata	10
1.5 Strategi Pembangunan Pariwisata	11
1.6 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Kepariwisataan 2020 s.d 2024.....	15
1.7 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenparekraf/Baparekraf.....	20
BAB II Aktor Strategis Industri Pariwisata	25
2.1 Sinergisitas Utama Pariwisata	25
2.2 Stakeholders dalam Industri Pariwisata	27
2.3 Orkestrasi Pariwisata	29
2.4 People Center Tourism.....	32
2.5 Pariwisata Berbasis Masyarakat.....	35
BAB III Exploring Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	38
3.1 Produk Wisata.....	38
3.1.1 Daya Tarik Wisata	40
3.1.2 Sarana dan Fasilitas Wisata	42
3.1.3 Aksesibilitas Wisata.....	44
3.2 Ekonomi Kreatif.....	44
3.2.1 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	45
3.2.2 Sub Sektor Ekonomi Kreatif	48
3.2.3 Ekonomi Kreatif dan Pembangunan Pariwisata.....	55
BAB IV Penerapan Pariwisata Bertanggung Jawab	57
4.1 Pariwisata Berkelanjutan	57
4.2 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.....	61
4.3 Praktik Alam	64

4.4 Ekowisata Pada Kawasan Yang Dilindungi	64
4.5 Hutan Sebagai Alternatif Wisata Minat Khusus.....	66
4.6 Peran Ganda Hutan.....	70
BAB V Ekosistem Hutan Sebagai Penyokong Pariwisata Alam.....	73
5.1 Urgensi Pengelolaan Hutan Penyokong.....	73
5.2 Skenario Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem	74
5.3 Pengelolaan Hutan Kita: Sudahkah Berbasis Ekosistem?	79
BAB VI Perlindungan Hutan Berbasis Ekosistem	83
6.1 Perlindungan Untuk Kelestarian.....	83
6.2 Implementasi Perlindungan Hutan Berbasis Ekosistem.....	84
6.3 Prinsip-Prinsip Implementasi Perlindungan Hutan	85
6.4 Implementasi Perencanaan Hutan Yang Mendukung Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem.....	87
DAFTAR PUSTAKA	92
TENTANG PENULIS	96

Daftar Tabel

Tabel 1 Peringkat TPCI negara ASEAN.....	5
Tabel 2 Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait Kemenparekraf/Baparekraf.....	18
Tabel 3 Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait Kemenparekraf/Baparekraf.....	19

Daftar Gambar

Gambar 1 Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI).....	4
Gambar 2 Skor TTCI negara ASEAN.....	6
Gambar 3 Tren subindeks TTCI Indonesia	7
Gambar 4 Kerangka strategis Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024	20
Gambar 5 Stakeholders dalam industri pariwisata.....	27
Gambar 6 Triangle Pemangku Kepentingan Pariwisata.....	33
Gambar 7 Indonesia Sustainable Tourism Frameworks.....	62

BAB I

Performansi Pariwisata

1.1 Pariwisata Instrumen Alternatif

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju, tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah (Pendit, 2006). Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara.

Dinamika terhadap konsep pembangunan di masa lalu yang menitik beratkan kepada top-down concept (sistem sentralisasi) kemudian berubah menjadi menjadi bottom-up concept (sistem desentralisasi) membawa implikasi pada akselerasi pertumbuhan di beberapa daerah, dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial sebagai sumber penghasil devisa bagi Indonesia. Kegiatan pariwisata meskipun saat ini masih menempati urutan kedua (2019) dalam pemasukan pendapatan dan devisa Negara setelah (CPO), tetapi harus diupayakan peningkatannya dan diharapkan menjadi primadona dalam memasok pendapatan dan devisa negara.

Sektor pariwisata sangat besar perannya dalam pembangunan ekonomi. Peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian dapat berupa menciptakan atau menambah lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan di mana industri itu berdiri seperti dalam usaha akomodasi, usaha penyediaan makanan minuman, pemandu wisata, biro perjalanan wisata, MICE dan usaha jasa lainnya. Industri pariwisata juga memberikan kontribusi langsung



terhadap sektor lain berupa usaha-usaha pemuatan dan perbaikan jalan raya, bandar udara, pelabuhan serta program kebersihan dan kesehatan yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan yang menikmatinya. Sektor pariwisata memacu dan memberi kontribusi kepada pelaksanaan proyek-proyek pada berbagai sektor dinegara-negara berkembang dan maju (Pendit, 2006).

Namun karena ambivalensinya pariwisata, pada saat yang sama juga dapat menimbulkan dampak toxic/mudarat, yang apabila tidak dikelola dengan baik seringkali megalahkan tonic /manfaatnya. Aspek sosial budaya dan lingkungan adalah paling sering menerima dampak toxic. Untuk mendapatkan keselarasan, maka pembangunan pariwisata hendaknya mengikuti prinsip-prinsip umum berkelanjutan, dengan melestarikan nilai-nilai kelokalan sebagai jati diri yang membangun citra pariwisata Indonesia.

People, Planet, Prosperity (3P) pariwisata merupakan sektor yang paling kecil menimbulkan kerusakan karena prinsip pembangunan pariwisata adalah sustainable atau berkelanjutan. Lingkungan yang terjaga merupakan aset bagi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan.

Di dunia, Sustainable Tourism Development telah menjadi tren, yaitu pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan 3P: Planet/Alam, People/Masyarakat, dan Prosperity/Kesejahteraan. Aspek people itu kita harus perhatikan apa keinginan wisatawan, lalu planet adalah bagaimana kita merawat dan menjaga tempat-tempat wisata, dan terakhir prosperity kita wajib perhatikan nilai-nilai ekonomis dari sebuah tempat wisata.

3P tersebut merupakan rumus pengembangan pariwisata yang terbaik untuk mencapai pariwisata yang semakin dilestarikan, akan semakin menyejahterakan. Wisatawan zaman now diharapkan tidak hanya sekedar berkunjung ke destinasi, tapi juga terlibat menjaga lingkungan dan budayanya.

Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Selain itu juga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, sehingga acuannya pun menjadi jelas.



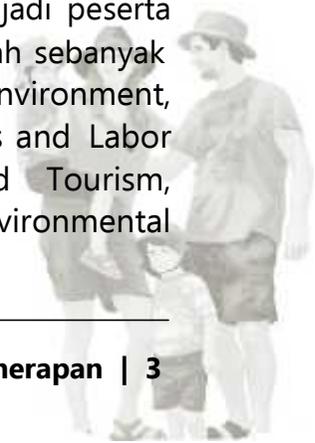
1.2 Capaian Pariwisata

Seperti kita ketahui daya saing pariwisata Indonesia untuk pilar environment sustainability pada Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) World Economic Forum (WEF) masih sangat rendah, kita berada di ranking 40 dari 141 negara.

Posisi yang memprihatinkan tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi semua destinasi wisata untuk terus menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan sebagaimana United Nation World Tourism Organization (UNWTO) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang mempertimbangkan tiga aspek besar yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi saat ini dan masa depan.

Walaupun saat ini industri pariwisata di seluruh negara terkena dampak penurunan angka kunjungan dan transaksi bidang pariwisata akibat dampak pandemik Covid-19, namun prospek pariwisata ke depan masih sangat menjanjikan dan optimis sangat memberikan peluang besar, terutama apabila menyimak angka-angka perkiraan jumlah wisatwan internasional (in bound tourism) berdasarkan perkiraan prediksi awal WTO dari data proyeksi tahun sebelumnya yakni 1,602 milyar orang tahun 2020, diantaranya masing-masing 231 juta orang dan 438 juta orang berada dikawasan Asia Timur dan Pasifik dan akan mampu menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 Triliun pada tahun 2020 (jika Pandemi Covid-19 Tidak terjadi)

Menurut The Travel & Tourism Competitiveness Report dari world Economic Forum 2019 (penilaian diadakan setiap 2 tahun sekali) Daya saing kepariwisataan Indonesia memiliki skor 4,3 menempati urutan ke-40 dunia. Indonesia masih jauh tertinggal dari Spanyol skor 54; menempati peringkat 1 sebagai pariwisata terbaik dunia, maupun negara-negara dalam satu wilayah Asia Tenggara seperti Singapura skor 4,8; menempati peringkat ke-17, Malaysia dengan skor 4,5; urutan ke-29 dan Thailand skor 4,5; peringkat ke-31. Namun, kabar baiknya Indonesia berhasil menaikkan peringkat yang sebelumnya tahun 2017 berada pada posisi ke-42 dengan skor 4,16. Ada 141 negara yang menjadi peserta penilaian dan indikator yang dijadikan acuan penilaian adalah sebanyak 14 indikator penilaian yang antara lain adalah: Business Environment, safety & Security, Healthy & Hygiene, Human Resources and Labor Market, ICT Readiness, Prioritization of Travel and Tourism, International Openness, Price Competitiveness, Environmental Sustainability, Air



Transport Infrastructure, Ground and Port Infrastructure, Cultural Resources and Business Travel. Berdasarkan capaian tersebut maka dapat dijadikan bukti bahwa Pariwisata Indonesia Makin Membaik sekaligus menjadi motivasi agar Pariwisata Indonesia dapat terus ditingkatkan kualitasnya.



Gambar 1. Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)

Sumber: Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1., subindeks pertama yaitu enabling environment dibentuk dari 5 (lima) pilar, subindeks kedua yaitu travel and tourism (T&T) policy and enabling conditions dibentuk dari 4 (empat) pilar, subindeks ketiga yaitu infrastructuredibentuk dari 3 (tiga) pilar, dan subindeks keempat yaitu natural and cultural resources dibentuk oleh 2 (dua) pilar. Indonesia menjadi salah satu negara yang penyelenggaraan sektor pariwisatanya diukur melalui TTCI.

Hasil penilaian TTCI pada tahun 2019 menunjukkan bahwa **Indonesia berada pada peringkat 40 dari 140 negara yang dinilai, dengan nilai TTCI sebesar 4,3.** Penilaian TTCI tahun 2019 terhadap Indonesia lebih baik daripada hasil penilaian pada periode tahun 2017, di mana Indonesia berada pada peringkat 42 dari 136 negara, dengan nilai TTCI sebesar 4,2. Selain Indonesia, TTCI juga melakukan penilaian terhadap negara-negara lain, termasuk negara-negara kompetitor Indonesia dalam sektor pariwisata di ASEAN, yang meliputi Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Philipina, dan Brunei Darussalam. Perbandingan performa sektor pariwisata ketujuh negara dalam ASEAN berdasarkan penilaian TTCI dapat dilihat pada **Tabel 1.1.**

Tabel 1. Peringkat TCI Negara ASEAN

No.	Negara	Peringkat			Skor TCI		
		2015	2017	2019	2015	2017	2019
1	Singapore	11 (dari 141)	13 (dari 135)	17 (dari 140)	4,9	4,9	4,8
2	Malaysia	25	26	29	4,4	4,5	4,5
3	Thailand	35	34	31	4,3	4,4	4,5
4	Indonesia	50	42	40	4,0	4,2	4,3
5	Vietnam	75	67	63	3,5	3,8	3,9
6	Brunei Darussalam	n/a	n/a	72	n/a	n/a	3,8
7	The Philippines	74	79	75	3,5	3,6	3,8

Sumber: Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1., pemeringkatan TCI beberapa negara ASEAN ini mengalami peningkatan dari penilaian periode tahun 2017, kecuali Singapore dan Malaysia. Singapore mengalami penurunan peringkat yang cukup tajam yaitu turun empat peringkat, dari peringkat 13 menjadi peringkat 17, kemudian Malaysia juga mengalami penurunan sebanyak tiga peringkat, dari peringkat 26 menjadi peringkat 29. Adapun Thailand, Indonesia, Vietnam, dan The Philippines mengalami peningkatan dalam pemeringkatan TCI. Thailand mengalami peningkatan 3 peringkat, dari peringkat 34 pada tahun 2017, menjadi peringkat 31 pada tahun 2019. Sedangkan Indonesia mengalami peningkatan 2 peringkat, dari peringkat 42 menjadi peringkat 40. Demikian pula Vietnam yang juga mengalami peningkatan, walaupun tidak begitu pesat seperti periode penilaian sebelumnya, negara ini memperoleh peringkat 63 pada penilaian periode 2019, dari sebelumnya yang menduduki peringkat 67 pada penilaian periode 2017. Pemeringkatan TCI periode 2019 ini memasukkan Brunei Darussalam dalam penilaiannya, dengan hasil yang cukup mampu menjadi pertanda bahwa Brunei Darussalam juga patut diperhitungkan sebagai salah satu potensial kompetitor bagi Indonesia, karena menduduki peringkat 72, lebih baik daripada peringkat Philipina yang menduduki peringkat 75. Perbandingan nilai atau skor TCI pada negara-negara yang mengalami penurunan peringkat seperti Singapore dan Malaysia, ada yang menunjukkan penurunan nilai, dan ada yang mengalami stagnasi pada nilai TCI yang diperoleh. Singapura mengalami penurunan dari 4,9 pada periode penilaian tahun 2017, menjadi 4,8 pada periode penilaian tahun 2019. Sedangkan Malaysia mengalami stagnasi nilai dari periode

penilaian tahun 2017 ke tahun 2019, yaitu tetap pada nilai TTCI 4,5. Analisis tren yang dilakukan terhadap nilai TTCI selama 3 (tiga) periode, yaitu periode 2015, 2017, dan 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 2. Skor TTCI Negara ASEAN.

Sumber: Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024

Berdasarkan **Gambar 2.**, tren menunjukkan kecenderungan kenaikan nilai TTCI pada negara-negara ASEAN yang menyelenggarakan sektor pariwisata, kecuali bagi Singapura dan Malaysia yang selama tiga periode penilaian TTCI dari 2015, 2017, dan 2019 terus mengalami penurunan peringkat, walaupun dari segi nilai TTCI dan peringkat diantara negara-negara ASEAN, Singapura dan Malaysia tetap unggul dan menduduki peringkat 1 serta peringkat 2. Sedangkan negara-negara lain dalam ASEAN, cenderung mengalami kenaikan nilai TTCI walaupun kenaikannya hanya berkisar antara 0,1 sampai 0,2 poin saja. Thailand yang mengalami kenaikan 0,1 poin pada nilai TTCI berturut-turut pada penilaian tahun 2015 dengan nilai 4,3 menjadi 4,4 pada tahun 2017, dan pada tahun 2019 menjadi 4,5.

Sedangkan Indonesia juga mengalami kenaikan nilai TTCI pada tiga periode penilaian berturut-turut. Pada periode penilaian TTCI tahun 2015, Indonesia memperoleh nilai 4,0 yang mengalami peningkatan pada periode penilaian tahun 2017, dengan memperoleh nilai 4,2 yang kemudian pada periode penilaian TTCI tahun 2019, Indonesia kembali memperoleh peningkatan nilai menjadi 4,3 poin. Adapun Vietnam yang pada periode penilaian TTCI tahun 2017 mendapat peningkatan

peringkat yang cukup signifikan, yaitu kenaikan sebanyak delapan poin, yaitu dari peringkat 75 pada tahun 2015 menjadi 79 pada tahun 2017, pada periode penilaian 2019 ini mendapat kenaikan nilai TTCI sebanyak 0,2 poin, dari tahun 2017 dengan nilai 3,6 menjadi 3,8 pada tahun 2019. Demikian juga dengan The Philippines yang memperbaiki peringkatnya pada penilaian periode 2019 ini, dari peringkat 79 pada tahun 2017 menjadi peringkat 75 pada tahun 2019, juga mengalami kenaikan nilai TTCI dari 3,6 pada tahun 2017 menjadi 3,8 pada tahun 2019.

Secara lebih detil, walaupun Indonesia mengalami peningkatan nilai TTCI secara keseluruhan, namun beberapa subindeks mengisyaratkan perlunya perhatian serta perbaikan, karena mengalami penurunan maupun stagnasi penilaian pada penilaian periode tahun 2019 terhadap penilaian periode 2017, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Tren Subindeks TTCI Indonesia

Sumber: Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024

Berdasarkan **Gambar 3.**, pada penilaian TTCI tahun 2019, Indonesia mengalami penurunan nilai pada dua subindeks, yaitu subindeks natural resources, dan subindeks cultural resources and business travel. Kenaikan nilai subindeks yang signifikan diperoleh Indonesia pada subindeks ICT readiness. Selain itu, pada dua subindeks yang mengalami kenaikan nilai

yang cukup signifikan, yaitu subindeks prioritization of Travel and Tourism, sebanyak 0,4 poin dibandingkan pada tahun 2017 yang mendapat nilai 5,6 menjadi 5,9 pada tahun 2019, dan pada subindeks safety and security, Indonesia juga mengalami kenaikan nilai yang cukup signifikan sebanyak 0,4 poin dari 5,1 pada tahun 2017, menjadi 5,4 pada tahun 2019. Subindeks lain yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah subindeks human resources and labour market, dari penilaian tahun 2017 yang mendapat nilai 4,6 meningkat menjadi 4,9 pada periode penilaian 2019, atau naik sebesar 0,4 poin.

1.3 Kepentingan dalam Pariwisata

Pariwisata memiliki pilar Pentahelix (5 Pilar Pembangun Pariwisata) yang terdiri dari unsur akademisi, dunia usaha, pemerintah, komunitas pendukung pariwisata, dan media. Setiap insan memiliki porsi peran yang sama pentingnya sebagai suksesor orkestrasi pembangunan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang pro job, pro poor, growth, invironment dalam pembangunan pariwisata. Untuk itu dengan ditulisnya buku ini diharapkan dapat memberikan suplemen pelengkap bagi pengetahuan dasar tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tantangan yang dihadapi umat manusia dewasa ini adalah perubahan peradaban yang terjadi dalam waktu cepat, dengan skala besar dan secara substansi mendasar. Michell, dkk. (2000) mengupas lebih jauh bahwa perubahan menimbulkan kompleksitas, ketidakpastian dan konflik sebagai peluang tetapi juga sekaligus mendatangkan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan menimbulkan perubahan keadaan dan pergeseran peran pelaku, ada yang diuntungkan dan dirugikan.

Kepariwisata sebagai salah satu kegiatan pembangunan diupayakan dapat sejalan dengan konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlu menerapkan kaidah-kaidah antara lain:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata berorientasi jangka panjang dan menyeluruh tidak hanya memanfaatkan tetapi sekaligus melestarikan objek dan daya tarik wisata yang memberikan manfaat secara adil bagi semua;
2. Pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter wilayah, kondisi lingkungan, konteks sosial dan dinamika budaya;



3. Penciptaan keselarasan, senergitas antara kebutuhan wisatawan dan penyedia oleh masyarakat lokal, yang memunculkan hubungan timbal balik dan saling menghargai nilai, adat istiadat, kebiasaan, warisan, budaya, dan lain-lain;
4. Pemanfaatan sumber daya pariwisata yang memperhitungkan kemampuan kelestariannya yang pengelolaannya secara eco-efficiency (reduce, reuse, recyle dan replace) sehingga mencapai eco-effectivity (redistribute, reactual);
5. Pengelolaan kegiatan pariwisata yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi dari kedua sisi permintaan (pasar) dan penawaran (produk), Nasikun (2000:26-27).

Pariwisata yang berpihak kepada pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development paradigma) pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global.

Pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata di mana masyarakat atau warga setempat memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan memengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Pariwisata berbasis masyarakat terkandung konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Pariwisata bukan sektor tunggal tetapi multi sektoral dengan melibatkan seluruh stakeholderdidalamnya, oleh karena itu kegiatan pariwisata diharapkan akan menjadi panacea, membuka peluang pendapatan/income tambahan bagi pundi-pundi kesejahteraan,



meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, menjaga kelestarian alam serta warisan lokal.

Keberlanjutan industri pariwisata yang pro lingkungan menjadi penepis streatip polutansi pariwisata konvensional selama ini. Pendekatan pariwisata yang pro environment, pro poor, proo job, dan pro growth menjadi slogan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, di mana meletakkan pariwisata dengan pemahaman, "semakin dilestarikan, maka semakin menguntungkan" Arief Yahya,(2019).

1.4 Amunisi Pariwisata

Kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan menghendaki semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menjaga lingkungan hidup dalam rangka memperoleh pertumbuhan ekonomi yang handal, berkelanjutan dan berkesinambungan yang diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang dan mendatang secara berkeadilan. Semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang langka dan berharga khususnya air dan energi, serta menghindari terbentuknya produk limbah atau sampah, hendaknya dapat diberi dorongan oleh pemerintah secara nasional, regional maupun lokal. Pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu maupun ruang, terutama yang disebabkan oleh cuti pekerja yang tetap dibayar serta liburan anak-anak sekolah, dan lebih pemeratakan pembagian waktu liburan sedemikian rupa, adalah mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan kepariwisataan dan meningkatkan kemanfaatan industri pariwisata dan perekonomian lokal.

Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam yang terdiri dari ekosistem dan keanekaragaman hayati serta untuk melestarikan spesies dan binatang yang dilindungi; para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus dapat menerima pemberlakuan pembatasan dan hambatan atas kegiatan mereka apabila itu diberlakukan khususnya terhadap wilayah yang sensitif seperti: padang gurun, wilayah kutub atau wilayah pegunungan yang tinggi, wilayah pesisir, hutan tropis atau daerah rawa-rawa, sebagai



wilayah yang tepat untuk dikembangkan taman nasional atau wilayah dilindungi;

Wisata alam atau wisata ekologi diketahui khususnya sebagai kegiatan yang mendukung dalam memperkaya dan meningkatkan reputasi kepariwisataan, sejauh kepariwisataan menjaga warisan alam dan menghormati penduduk setempat serta tetap memperhatikan daya dukung tempat.

1.5 Strategi Pembangunan Pariwisata

Permintaan pariwisata merupakan masalah yang kompleks, mulai dari jenis perjalanan keluarga ke tempat-tempat terdekat yang sering dikunjungi sampai penerbangan antar benua dari biro perjalanan. Oleh karena itu, permintaan produk wisata diseluruh dunia. Demikian pula permintaan produk wisata domestik memiliki variabel yang sangat tinggi sehingga tidak mungkin membuat rencana seluruh permintaan wisatawan.

Agar sejauh mungkin permintaan wisatawan dapat dipenuhi dan produk wisata yang disajikan sesuai dengan selera pasar, perlu dilakukan analisis tentang potensi wilayah baik yang menyangkut produk utama maupun pendukung yang merupakan satu kesatuan atraksi atau daya tarik. Pokok-pokok yang dianalisis adalah berkaitan dengan rentang permintaan produk wisata yang luas, mulai dari fasilitas khusus, akomodasi atraksi dan fasilitas pendukung lainnya.

Pertimbangan dalam penggunaan analisis adalah faktor musim liburan, adanya suatu festival dan faktor lainnya yang memengaruhi pola permintaan.

Pengembangan pariwisata diarahkan pada pelestarian alam, konservasi budaya dan perkembangan yang berkelanjutan. Tempat dan pentahapan pengembangan dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan dan dirinci dalam perencanaan pemanguan pariwisata secara jelas. Berbagai bentuk dan jenis atraksi pariwisata yang dapat menarik wisatawan dan menimbulkan minat wisatawan untuk mengunjungi salah satu atau berbagai atraksi wisata tersebut.

Seperti diketahui bersama pariwisata meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, serta subsektor usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan daya tarik wisata yang



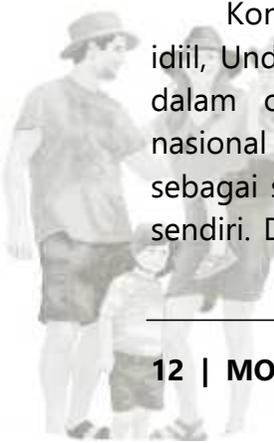
berwujud dalam hal ini diistilahkan 3A yakni atraksi (daya tarik wisata), amenitas (sarana pariwisata) dan aksesibilitas (akses kemudahan menjangkau destinasi wisata). Atraksi dapat dinikmati wisatawan dalam bentuk kekayaan daya tarik wisata yang berwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah; keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala. Amenitas wisata adalah penyediaan sarana seperti sarana akomodasi, restoran, sarana listrik, jaringan internet dan lainnya, sedangkan aksesibilitas adalah prasarana jalan, jembatan, bandar udara, pelabuhan dan terminal bis antar kota misalnya. Kolaborasi 3A pengembangan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha pariwisata, seperti usaha perjalanan, usaha penyediaan akomodasi dan transportasi wisata, akan dapat meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya daya tarik wisata yang baru. Hasil yang optimal dapat diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai.

Pembangunan kepariwisataan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan sektor kepariwisataan secara nasional yang berkesinambungan. Kesemuanya meliputi seluruh kegiatan masyarakat, bangsa dan negara untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk itu, pembangunan kepariwisataan nasional dilandasi konsep kehidupan yang seimbang dan selaras, yaitu:

- a. Hubungan manusia dan Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Hubungan antara manusia dan sesama manusia;
- c. Hubungan manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam baik berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis.

Konsep tersebut jelas sejalan dengan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, serta dalam operasionalnya adalah bahwa pembangunan kepariwisataan nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan, baik sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan nasional harus



bertumpu di atas semua aspek kehidupan masyarakat berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam sebagai struktur fundamental.

Sedangkan kekuatan inti untuk mengerjakan pembangunan kepariwisataan nasional adalah kepaduan kekuatan yang bersinergi, yang terdiri dari pentahelix pembangunan kepariwisataan Penthalix (5 Pilar Pembangun Pariwisata) yang terdiri dari unsur akademisi, dunia usaha, pemerintah, komunitas pendukung pariwisata, dan media. Sistem kepariwisataan nasional dilandasi oleh konsep kehidupan bangsa Indonesia yang berkesinambungan, yaitu hubungan manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis dengan menggunakan pendekatan ketahanan nasional.

Hubungan secara vertikal manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, menempatkan nilai-nilai agama sebagai nilai tertinggi dalam pembangunan nilai-nilai agama sebagai nilai tertinggi dalam pembangunan kepariwisataan nasional. Segala usaha dan kegiatan pembangunan kepariwisataan digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan Etika kepariwisataan nasional.

Masyarakat Indonesia dengan segala hasil budayanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi titik sentral, subjek pembangunan dan kekuatan dasar pembangunan kepariwisataan. Peran serta dan keterlibatan masyarakat secara nyata.

Kepariwisataan nasional yang bertumpu pada masyarakat sebagai kekuatan besar, menjadikan kepariwisataan bertumpu pula pada semua aspek kehidupan masyarakat, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Kepariwisataan mampu membangun kondisi semua aspek kehidupan bangsa dan pariwisata akan turut mampu membangun:

1. Ketahanan ideologi, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keberibadian bangsa.



2. Ketahanan politik, yaitu kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan proaktif.
3. Ketahanan ekonomi, yaitu kondisi perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan yang mengandung kemampuan memelihara kemampuan stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
4. Ketahanan sosial budaya, yaitu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
5. Ketahanan hankam, yaitu kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh insan pariwisata yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Selain kelima aspek tersebut berpengaruh dan dipengaruhi oleh pembangunan kepariwisataan, ada tiga faktor yang sangat berperan dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia yaitu:

- a. Modal Sumber Daya Alam, telah diketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan mempunyai unsur-unsur keindahan alam/ natural beauty, keaslian/originality, kelangkaan/scarcity, dan keutuhan/wholeness, dan diperkaya dengan kekayaan alam berupa keanekaragaman flora dan fauna, ekosistem, serta gejala alam yang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata Indonesia.
- b. Penduduk, Penduduk Indonesia yang memiliki adat dan keramah tamahan, terdiri atas beberapa suku bangsa dengan keanekaragaman budaya yang sangat berpengaruh bagi upaya



pembangunan nasional yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

- c. Geografi, Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas kurang lebih 17.508 pulau yang mencakupi wilayah yang luasnya lebih dari 1,9 juta km² dan dua pertiganya merupakan wilayah perairan dan memiliki garis pantai lebih dari 81.000 km. posisi Indonesia yang sangat strategis merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh bagi pembangunan bangsa dan Negara. Kondisi geografis yang demikian memberikan peluang yang besar bagi upaya pembangunan pariwisata.

1.6 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Kepariwisataan 2020 s.d 2024

Sesuai Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024 arah pembangunan nasional lima tahun ke depan dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Hingga saat ini, RPJMN masih berbentuk naskah teknokratik yang rencananya akan disahkan menjadi RPJMN pada bulan Januari tahun 2020. Sehingga arah kebijakan dan strategi nasional akan diambil dari arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam naskah teknokratik RPJMN tahun 2020-2024 revisi per 7 Januari tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middleincome country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan arah pembangunan nasional lima tahun ke depan dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi nasional akan diambil dari arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam naskah RPJMN tahun 2020-2024 tahun 2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan



memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middleincome country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan Arah pembangunan nasional lima tahun ke depan dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi nasional akan diambil dari arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam naskah RPJMN tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middleincome Country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Keempat pilar tersebut adalah:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. RPJMN tahun 2020-2024 mengusung tema pembangunan Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Tema pembangunan ini sekaligus menjadi visi Presiden terpilih dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024. Tema pembangunan ini dilaksanakan melalui tujuh agenda pembangunan yang merupakan Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV tahun 2020-2024. Ketujuh PN tersebut adalah:

1. PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

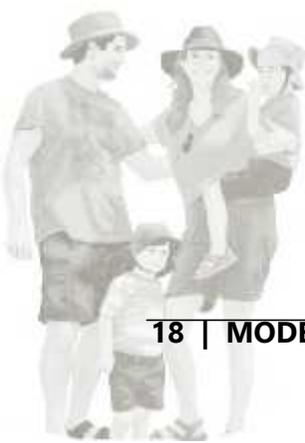
Kemenparekraf/Baparekraf diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya, maka Kemenparekraf/Baparekraf secara konkrit memberikan kontribusi dalam program prioritas meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sasaran, indikator serta target yang diharapkan dapat dicapai Kemenparekraf/Baparekraf pada naskah RPJMN ini dapat dijabarkan pada Tabel 2. berikut ini.



Tabel 2. Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait Kemenparekraf/ Baparekraf

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
1	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	12. Penumbuhan <i>start-up</i> (kontribusi <i>start-up</i> Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	700 unit (akumulatif)	3.500 unit (akumulatif)
2	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	10. Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)	4,8%	5,5%
		11. Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan	3 Destinasi	8 Destinasi
		12. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas	25 kawasan hutan prioritas	25 kawasan hutan prioritas
		13. Destinasi wisata bahari	7 Destinasi	7 Destinasi
		14. Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp. 1.214 triliun	Rp.1.846 triliun

Sumber: Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024



Tabel 3. Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait Kemenparekraf/Baparekraf

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		15. Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi	4 kab/kota	20 kab/kota (kumulatif)
		16. Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan	8 lokasi	11 lokasi
		17. Revitalisasi ruang kreatif	30 unit	42 unit
		18. Kontribusi ekonomi digital	3,2%	4,7%
		25. Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*)	13 juta orang	15 juta orang
		26. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19 juta orang	21 juta orang
3	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	10. Nilai devisa pariwisata (0.9.1(c))	USD 21 Milyar	USD 32 Milyar
		11. Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a))	10 juta orang	24 juta orang
		12. Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (<i>cultural heritage regeneration</i>)	4 lokasi	20 lokasi (kumulatif)
		13. Nilai ekspor ekonomi kreatif	USD 21,5-22,3 miliar	USD 24,5 miliar
		16. Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b))	312 juta perjalanan	350-400 juta perjalanan
		17. Jumlah promosi <i>Tourism, Trade and Investment (TTI)</i> terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi
4	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	5. Skema pembiayaan berbasis HKI	1 skema	1 skema
		10. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500 orang	1.500 orang

Sumber: Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024



Kememparekraf/Baparekraf berkontribusi dalam mewujudkan sasaran dan indikator RPJMN di atas, di mana kontribusi tersebut dapat diwujudkan pada level menteri, eselon I, maupun eselon II. Tentunya penggunaan sasaran berupa impact (level Menteri), outcome (level I), output (level II) maupun penggunaan indikator SMART akan sangat menentukan pemilihan indikator kinerja Kememparekraf/ Baparekraf dalam mewujudkan standar kinerja organisasi yang berkualitas.

1.7 Arah Kebijakan dan Strategi Kememparekraf/ Baparekraf

Arah kebijakan dan strategi Kememparekraf/Baparekraf menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan.

Dalam formulasi strategi, sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan organisasi dalam hal ini Menteri dan seluruh pejabat tinggi negara. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra Kememparekraf/ Baparekraf yang diterjemahkan dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) maupun Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani seluruh pimpinan hingga staf Kememparekraf/Baparekraf. Kerangka strategis yang menjadi strategic direction Kememparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Gambar 1.4** berikut di bawah ini.



Gambar 4. Kerangka strategis Kememparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024

Sumber: Rencana Strategis Kememparekraf/Baparekraf 2020-2024

Tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu solusi cepat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam mewujudkan Visi Presiden tahun 2024. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan lima pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pilar kreativitas.

Pilar pertama terkait destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, di mana pilar ini menekankan pada pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis Kawasan Ekonomi Kreatif dan Kluster Penguatan Ekonomi Kreatif. Pengembangan jumlah maupun jenis produk ekonomi kreatif akan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. Selain itu, pada pilar ini juga akan dilakukan pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berdasarkan prioritas. Destinasi pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah destinasi pariwisata yang mampu memenuhi unsur 3A, yaitu Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Pilar ini juga menekankan pentingnya diversifikasi produk pariwisata berbasis kreativitas, di mana tidak hanya produk pariwisata baru yang dihasilkan, melainkan juga pasar baru yang belum disentuh selama ini melalui produk baru tersebut.

Pilar kedua adalah pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemasaran merupakan salah satu komponen penting di manapunya pemasaran dilakukan guna menciptakan kebutuhan pelanggan akan produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam konteks pariwisata, pemasaran dilakukan terhadap ceruk pasar (niche market) untuk wisatawan mancanegara premium, yaitu menargetkan segmen wisatawan dengan belanja atau pengeluaran yang besar. Hal ini dilakukan melalui pemasaran produk pariwisata MICE, yaitu Meeting, Incentives, Conferencing dan Exhibition (MICE) maupun melalui wisata minat khusus seperti cruise tourism. Pembangunan citra pariwisata

nasional sebagai salah satu destinasi wisata dunia juga penting mengingat citra menjadi faktor utama dalam menentukan wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, paradigma pemasaran yang dilakukan adalah perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Pengembangan pasar dari narrow market menjadi broader market akan dilakukan secara masif, baik melalui regulasi yang berpihak kepada masyarakat maupun melalui pemberdayaan masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Pilar ketiga adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana pertumbuhan dan pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf. Pilar ini menitikberatkan pada pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencakup 13 bidang usaha pariwisata dan 16 bidang usaha ekonomi kreatif. Tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga penting untuk dilakukan, khususnya dalam menciptakan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif dan sinergis. Selain itu, investasi pendanaan, dan akses pembiayaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam memperkuat Pilar kedua adalah pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemasaran merupakan salah satu komponen penting di mana upaya pemasaran dilakukan guna menciptakan kebutuhan pelanggan akan produk pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam konteks pariwisata, pemasaran dilakukan terhadap ceruk pasar (niche market) untuk wisatawan mancanegara premium, yaitu menargetkan segmen wisatawan dengan belanja atau pengeluaran yang besar. Hal ini dilakukan melalui pemasaran produk pariwisata MICE, yaitu Meeting, Incentives, Conferencing dan Exhibition (MICE) maupun melalui wisata minat khusus seperti cruise tourism. Pembangunan citra pariwisata nasional sebagai salah satu destinasi wisata dunia juga penting mengingat citra menjadi faktor utama dalam menentukan wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, paradigma pemasaran yang dilakukan adalah perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif. Pengembangan pasar dari narrow market menjadi broader market akan dilakukan secara masif, baik melalui regulasi yang berpihak kepada masyarakat maupun melalui pemberdayaan masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif.

Pilar ketiga adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana pertumbuhan dan pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf. Pilar ini menitikberatkan pada pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencakup 13 bidang usaha pariwisata dan 16 bidang usaha ekonomi kreatif. Tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga penting untuk dilakukan, khususnya dalam menciptakan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif dan sinergis. Selain itu, investasi pendanaan, dan akses pembiayaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam memperkuat ekosistem maupun pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Pilar keempat adalah SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. SDM merupakan strategic weapon yang menentukan keberhasilan organisasi. Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan melalui optimasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, sertifikasi profesional juga menjadi upaya lain dalam menjamin kualifikasi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif secara kompetensi. Selain SDM, pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pilar terakhir adalah kreativitas, di mana terdapat dua isu terkait pilar ini. Isu pertama adalah terkait perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual di Indonesia. Pemerintah perlu turun tangan untuk memastikan jaminan perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan kekayaan intelektual masyarakatnya sehingga menjadi pemicu untuk menumbuhkembangkan kreativitas. Selain itu, perlu dilakukan juga upaya dalam mendorong munculnya kreasi masyarakat dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK.

Kelima pilar ini perlu dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Namun, kelima pilar ini perlu ditopang oleh pondasi yang kuat, agar bisa berdiri dan terlaksana sesuai rencana. Pondasi tersebut adalah aspek manajerial dalam organisasi yang menjadi aset strategis



Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu:

- a) Riset dan inovasi pariwisata dan ekonomi kreatif
- b) Simplifikasi regulasi mendukung pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
- c) Adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna
- d) Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf



BAB II

Aktor Strategis Industri Pariwisata

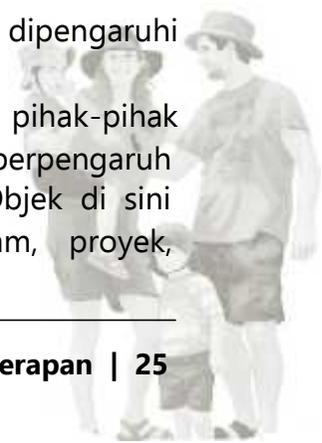
2.1 Sinergisitas Utama Pariwisata

Pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri dalam pengembangan industri pariwisata karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik itu dalam bidang kapital/modal, sumber daya manusia (SDM) ataupun bidang manajemennya. Dengan demikian pemerintah harus melakukan kerjasama atau bermitra dengan aktor lain yaitu sektor privat (swasta) maupun masyarakat. Masyarakat akan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengembangan kepariwisataan, serta dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai pelaku dan penentu pengembangan kepariwisataan utamanya dalam skala lokal begitupun dengan sektor privat (swasta).

Kebutuhan kemitraan dengan melibatkan negara, swasta dan lembaga sosial kemasyarakatan baik ditingkat lokal dan internasional menjadi kebutuhan yang urgen bagi pemerintah. Sinergisitas kemitraan ini sering disebut sebagai stakeholders (pemangku kepentingan) pariwisata. Para stakeholders adalah semua pihak yang terlibat pada seluruh aktifitas pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan terutama masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif dan juga merasakan dampak positif dari pariwisata.

Stakeholders adalah setiap kelompok atau individu yang dipengaruhi atau yang dapat memengaruhi masa depan perusahaan, pelanggan, pekerja, pemasok, pemilik, pemerintah, lembaga keuangan, kritikus, dan sebagainya. Stakeholders didefinisikan sebagai orang, kelompok, atau organisasi apa pun yang dapat melakukan klaim atau perhatian sumberdaya, atau hasil (output) organisasi, atau dipengaruhi oleh hasil (Byson, 2008).

Secara umum stakeholder dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan atau perhatian dan berpengaruh atau terkena dampak secara langsung terhadap objek. Objek di sini dapat berupa masalah, organisasi, kebijakan, program, proyek,



bangunan fisik dan sebagainya. Antara tiap stakeholders akan memberikan penilaian yang beragam. Faktor-faktor yang memengaruhi penilaian stakeholder terhadap suatu objek tertentu antara lain: kepentingan, pengalaman pribadi, pengaruh orang lain, adat istiadat dan budaya, media massa, data yang dimiliki dan pendidikan.

Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan stakeholders dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholders, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholders-nya (Cariri dan Ghazali, 2007).

Kasali dalam Wibisono (2007, hal 90) membagi stakeholders menjadi sebagai berikut:

1. Stakeholders Internal dan Stakeholders eksternal.

Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholder). Sedangkan stakeholders eksternal adalah stakeholders yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsibility investor, licensees partner dan lain-lain.

2. Stakeholders primer, sekunder dan marjinal.

Tidak semua elemen dalam stakeholders perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. Stakeholders yang paling penting disebut stakeholders primer, stakeholders kurang penting disebut stakeholders sekunder dan yang biasa diabaikan disebut stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu.

3. Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan. Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai stakeholders tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholders masa depan adalah stakeholders pada masa akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.

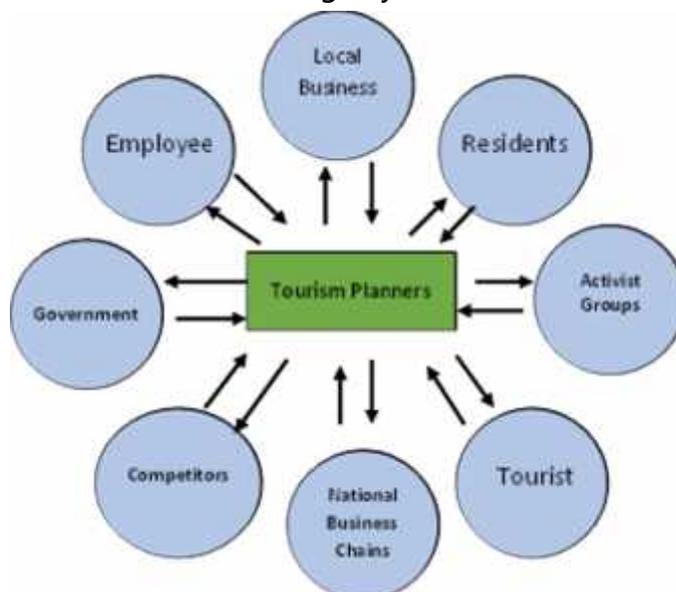
Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang menuntut harus



mempertimbangkan semua kepentingan pelbagai pihak yang terkena pengaruh dari tindakanya. Acuan pertimbangan para manajer dalam mengambil keputusan dan tindakan bukan semata-mata para pemegang saham, melainkan juga pihak lain manapun yang terkena pengaruhnya. Dalam pandangan teori pemangku kepentingan melihat perspektif bisnis sebagai "kesadaran sosial" di mana perusahaan harus sensitif terhadap kerusakan potensial dari tindakannya terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan. Di samping itu bisnis dipandang sebagai "aktivitas sosial" yang memandang perusahaan harus menggunakan segala sumber dayanya untuk kepentingan publik.

2.2 Stakeholders dalam Industri Pariwisata

Dalam industri pariwisata ada berbagai pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Setiap pihak ini akan mempunyai pengaruh ataupun dipengaruhi oleh kegiatan dalam industri pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak tersebut antara lain: pemerintah, pesaing, masyarakat lokal wisatawan, LSM, pengusaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata baik langsung maupun tidak langsung, misalnya: travel agent, pengusaha hotel/ penginapan, pengusaha transportasi, pengusaha tempat wisata, pengusaha hiburan, pengusaha souvenir, dan lain sebagainya.



Gambar 5 Stakeholders dalam industri pariwisata
Sumber: Modul Pengantar Kepariwisataan, Kemenpar 2016



Pemerintah dan pemerintah daerah merupakan unsur penting dalam pemangku kepentingan dalam industri pariwisata. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam industri pariwisata. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama memiliki peran dalam:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitasi, dan kepastian hukum;
- c. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset-aset potensial yang belum tergali, dan;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pengusaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan pariwisata. Pengusaha ini misalnya pengusaha akomodasi (hotel, resort, penginapan), pengusaha transportasi, pengusaha biro perjalanan, pengusaha restoran, toko souvenir dan lain-lain sebagainya. Setiap pengusaha pariwisata berperan untuk:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil, serta koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;



- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usaha;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra bagi negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab.

Wisatawan. Setiap wisatawan berperan untuk:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Jadi pada dasarnya semua pihak adalah pemangku kepentingan dalam dunia pariwisata dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang dalam masyarakat berperan untuk selalu menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, dan membantu terciptanya suasana yang mengandung unsur 7 sapta pesona, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Dan berperilaku santun, dan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan destinasi.

2.3 Orkestrasi Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian dari sektor industri di Indonesia yang prospeknya akan semakin cerah, walaupun pandemi novel corona /covid-19 mendera, namun optimisme akan potensi serta peluang yang sangat besar untuk dapat menopang sendi-sendi kesejahteraan masyarakat lokal dan memberikan pemasukan devisa yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Sejak tahun 1990 industri pariwisata masih merupakan industri penghasil devisa terbesar ketiga setelah minyak dan kendaraan bermotor. Hingga saat ini kebutuhan akan rekreasi dan refreshing dalam kegiatan pariwisata masih merupakan



kebutuhan yang penting bagi manusia. Perilaku ini terjadi seiring dengan meningkatnya kesejahteraan perekonomian dunia secara global dan semakin bertambahnya jumlah hari cuti/libur di beberapa belahan dunia.

Seiring bergesernya paradigma pariwisata konvensional, yang paralel dengan perubahan orientasi berwisata wisatawan. Dinyalir karena adanya perubahan permintaan pasar terhadap kualitas dari pola aktivitas atau perjalanan wisata. Perubahan profil pasar global dipengaruhi oleh perkembangan signifikan pada aspek sosio demografis pasar, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada negara-negara asal wisatawan sehingga menciptakan kelompok pasar dengan tingkat penghasilan tinggi dan memiliki ekspektasi yang lebih dalam melakukan perjalanan wisata. Kondisi ini menyebabkan produk-produk wisata konvensional mulai ditinggalkan dan makin tingginya permintaan perjalanan wisata baru yang "lebih" berkualitas yang dikenal sebagai wisata minat khusus atau special interest tourism.

Secara umum motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat dapat dikategorikan berdasarkan **wisata budaya, wisata maritim atau bahari, wisata cagar alam, wisata konvensi, wisata pertanian, wisata buru dan wisata ziarah**. Pariwisata Indonesia memiliki potensi luar biasa yang mampu dijadikan modal pembangunan antara lain: warisan budaya yang kaya, bentang alam yang indah, letak dekat pasar pertumbuhan Asia, penduduk potensial (jumlah & mampu) dan tenaga kerja (jumlah dan murah). Peluang tersebut didukung oleh kondisi-kondisi alamiah seperti, letak dan keadaan geografis (lautan dan daratan sekitar khatulistiwa), lapisan tanah yang subur dan panoramis (akibat ekologi geologis), serta berbagai flora dan fauna yang memperkaya isi daratan dan lautannya.

Pariwisata adalah bisnis yang luar biasa besar dan melibatkan perputaran uang dalam skala masif. Sayangnya, bisnis ini relatif sulit untuk dimainkan. Maklum, pariwisata membutuhkan maintenance cost yang konstan. Begitu racun menggerogoti, belangnya akan tampak di permukaan. Kualitasnya pun akan langsung deteriorate. Lain daripada itu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata juga menyumbang bagi meningkatnya kerusakan lingkungan yang notabene merupakan sumber daya pariwisata di berbagai daerah destinasi wisata. Usaha industri pariwisata merupakan usaha yang kelangsungannya sangat bergantung



kepada lingkungan, tetapi di lain pihak pariwisata dapat menimbulkan masalah lingkungan, dan secara tidak langsung juga menjadi korban dari masalah yang ditimbulkannya.

Indikator keberhasilan pariwisata konvensional (mass tourism) salah satunya diidentikan dengan parameter banyaknya jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke suatu negara. Tren perkembangan zaman saat ini membawa kecenderungan bertambahnya jenis-jenis pariwisata baru antara lain pariwisata minat khusus (special Interest Tourism), tergantung kepada kondisi dan situasi dunia kepariwisataan di suatu daerah atau negeri, serta selera masyarakat atau daya kreativitas para profesional yang berkecimpung dalam usaha industri pariwisata. Makin kreatif dan banyak gagasan-gagasan yang dimiliki oleh mereka yang mendedikasikan hidup mereka bagi perkembangan dunia kepariwisataan, makin bertambah pula bentuk dan jenis wisata yang diciptakan bagi kemajuan industri ini. Namun seiring perkembangan pariwisata yang kian meningkat hal ini juga membawa dampak lain.

Pada awalnya pariwisata dipuji-puji sebagai kegiatan ekonomi yang "tidak berbahaya", sehingga sering disebut sebagai "industri tanpa asap". Kepariwisataan dipandang sebagai industri yang bebas dari berbagai polusi yang umum dihasilkan dari berbagai industri lain seperti manufaktur, pertambangan, industri pengolahan kayu dan sebagainya. Sejak tahun 1970-an anggapan ini mulai dipertanyakan, karena kepariwisataan dengan berbagai aktivitas ikutannya mempunyai dampak yang sangat besar terhadap lingkungan fisik, peninggalan arkeologis, serta berbagai bentuk kebudayaan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak.

Perencanaan pariwisata partisipatif menjadi sebuah isu penting berkaitan dengan masih terbatasnya pemahaman banyak pihak mengenai pariwisata. Perencanaan diperlukan sebagai proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, mengidentifikasi sasaran, penjelasan dan juga mengevaluasi metoda menuju keberhasilan. Dengan perencanaan yang komprehensif berarti perencanaan mempertimbangkan semua sumber daya pariwisata, organisasi, pasar, dan program di dalam suatu daerah. Perencanaan komprehensif juga mempertimbangkan ekonomi, lingkungan, sosial, dan aspek pengembangan kelembagaan pariwisata.



Seperti umumnya perencanaan pariwisata partisipatif adalah kerjasama yang erat antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang berorientasi gol, bekerja keras untuk mencapai sasaran tertentu, mempertemukan program dan sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Perencanaan komprehensif memerlukan suatu sistematis pendekatan, yang umumnya menyertakan satu rangkaian langkah-langkah. Perencanaan itu sendiri merupakan "tools" dan bukan tujuan, dapat berubah-ubah menurut tempat, waktu dan keadaanrupa sehingga fleksibel untuk tiap era pembangunan. Proses terbaik dipandang sebagai suatu iterative dan berkesinambungan, dengan masing-masing langkah tunduk kepada modifikasi dan perbaikan pada manapun langkah proses perencanaan. Dengan demikian hakekat perencanaan pariwisata adalah pengambilan keputusan pariwisata (Tourism Decision Making).

2.4 People Center Tourism

Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009, tentang kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.



Secara umum, konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan merupakan konsep alternatif yang ada pada kutub yang berlawanan dengan konsep pembangunan konvensional, karena pembangunan berkelanjutan mencakup usaha untuk mempertahankan integritas dan diversifikasi ekologis, memenuhi kebutuhan dasar manusia, terbukanya pilihan bagi generasi yang akan datang, pengurangan ketidakadilan akibat penguasa maupun kaum kapitalis, dan peningkatan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat setempat. Peran sentral perencanaan pariwisata harus mempertimbangkan struktur masyarakat yang meliputi: struktur sosial seperti tingkat pendidikan masyarakat, budaya masyarakat seperti: agama, adat-istiadat, keadaan ekonomi masyarakat (mata pencaharian, tingkat pendapatan) agar perencanaan tersebut tidak menimbulkan permasalahan kesenjangan sosial, kemerosotan budaya, ketimpangan pendapatan, pengangguran, sebagai akibat keterpinggiran masyarakat oleh dominasi investor. Nelson, J., Butler, R., & Wall, G. (1993). Mengatakan bahwa pada hakekatnya pariwisata berkelanjutan harus terintegrasi pada tiga dimensi yakni: 1. dimensi lingkungan, 2. dimensi ekonomi, 3. dimensi sosial. Demikian pula halnya pemerintah dalam merencanakan perencanaan pariwisata harus mampu mengakomodasikan agar tercipta keharmonisan masyarakat dengan investor dengan tetap memenuhi dan memuaskan kebutuhan wisatawan. Tujuan final dari perencanaan pembangunan berkelanjutan bermuara kepada tercapainya pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian (conservation), memanfaatkan (economic dimension), dan mengembangkannya berdasarkan tatanan sosial (social dimension) yang telah ada di masyarakat.



Gambar 6. Triangle Pemangku Kepentingan Pariwisata
Sumber: Perencanaan Pariwisata Partisipatif



Pengembangan fasilitas kepariwisataan memiliki potensi berbenturan antara kepentingan masyarakat yang religius dengan investor yang mempunyai/menganut “profit motive”, oleh karena itu harus diakomodasikan agar serasi di antara keduanya, sehingga pemerintah sebagai pengambil kebijakan (policy maker) tetap harus berpijak pada aturan yang telah disepakati, jadi perlunya “Good Will” dari pembuat kebijakan. Dalam perencanaan, agar masyarakat tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan, maka perencanaan dan aspirasi dari atas (top down planning) harus dipadukan dengan perencanaan dan aspirasi dari bawah (bottom up planning).

Dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, penekanan berkelanjutan bahkan tidak cukup dengan berkelanjutan ekologis dan berkelanjutan pembangunan ekonomi. Tidak kalah pentingnya adalah berkelanjutan kebudayaan, karena kebudayaan merupakan salah satu “sumber daya” yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan. Secara teoritis, pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai kalau tingkat pemanfaatan berbagai sumber daya tidak melampaui kemampuan regenerasi sumber daya tersebut. Pemanfaatan yang terkendali ini dapat dilakukan jika memenuhi syarat:

- a. Adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. pertumbuhan pariwisata hendaknya “cukup rendah” sehingga tidak melampaui toleransi sumber daya alam tempat kehidupan manusia tergantung.
- b. Kebutuhan manusia harus dibatasi termasuk pembatasan jumlah konsumen melalui pembatasan kelahiran, manfaat pembangunan ekonomi harus didistribusikan secara adil dan mereka yang menderita harus mendapatkan prioritas lebih tinggi di dalam memanfaatkan hasil pembangunan.
- c. Adanya perencanaan yang baik, yang sudah mengantisipasi perkembangan kedepan.
- d. Adanya kepastian hukum pelaksanaan rencana, sehingga rencana dapat dilaksanakan secara konsisten.
- e. Adanya keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam pembangunan kepariwisataan, termasuk di dalamnya menikmati manfaat ekonomi kepariwisataan.



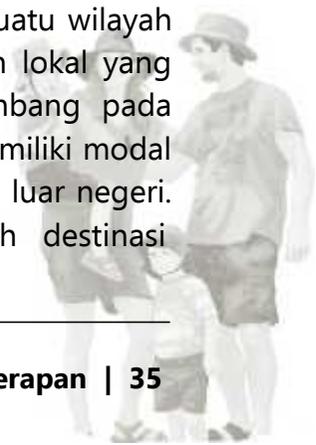
- f. Pemanfaatan berbagai sumber daya (termasuk sumber daya alam, sosial dan budaya) harus dilakukan secara efisien dan dibawah ambang daya dukungnya dengan penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Keterlibatan masyarakat lokal (community-based approach) dianggap sebagai prasyarat tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan, hal ini didasarkan pada hipotesis bahwa masyarakat setempat sudah mempunyai pengetahuan di dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya atas pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi atas pengetahuan dan pengalaman tersebut, masyarakat setempat pada umumnya sudah mempunyai kesadaran penuh untuk mengembangkan berbagai hal yang ramah lingkungan, serta dapat diterima secara sosial budaya religius. Pembangunan harus mengangkat kembali "tradisional knowledge", "local knowledge", atau "ethnoscience", yang sudah eksis di masyarakat lokal selama puluhan bahkan ratusan tahun yang merupakan adaptasi ekologis masyarakat setempat.

2.5 Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat bukanlah hal yang baru bagi pelaku industri pariwisata. Hal ini sejak lama telah menjadi tren tersendiri bagi pariwisata di Amerika dan Eropa, dikarenakan kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya menjaga kehidupan alam dan budaya yang ada. Untuk Indonesia sendiri tren pariwisata berbasis masyarakat kian dipraktekan secara luas, dalam beberapa dekade ini makin lama kian diperhitungkan dikarenakan siapa pun pihak yang mengimplemetasikan dirasakan dapat memperoleh manfaat daripada aktivitas pariwisata berbasis masyarakat ini.

Berbicara mengenai komunitas berbasis masyarakat. Ada masyarakat yang menjadi subjek pelaku dripada aktifitas pariwisata. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada disuatu wilayah geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di sekitarnya. Dinegara-negara maju dan berkembang pada umumnya pariwisata dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Sehingga masyarakat lokal yang berada disuatu daerah destinasi



pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk stakeholders dari pariwisata dan merupakan kelompok kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata. Masyarakat sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal dilokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama. Sebagai suatu pemukiman yang terkecil di atasnya ada kota kecil (town), dan di atas kota kecil ada kota besar (city).

Masyarakat dilibatkan dengan fokus perhatian lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang masih perlu diberdayakan mengingat kondisi masyarakat tidak berdaya. Konsep komunitas masyarakat yang baik (good community) mengandung sembilan nilai (the competent community) Taliziduhu(1990:57-58).

- a. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan lain berdasar hubungan pribadi.
- b. Komunitas memiliki otonomi, kewenangan, dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri.
- c. Memiliki viabilitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri.
- d. Distribusi kekayaan yang merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas.
- e. Masyarakat bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.

Dengan pengertian tersebut, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama dan menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat, di dalamnya terkandung konsep pemberdayaan masyarakat. Tentu saja pemberdayaan ini harus sejalan dengan karakteristik dari masyarakat yang mempunyai ciri dan latar belakang. pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi, suasana atau iklim



yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Dan yang pasti tanpa mengganggu keharmonisan yang telah terjaga selama ini. Selain itu pariwisata berbasis masyarakat harus mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat atau warga setempat untuk memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan, memengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka.

Pariwisata berbasis masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pengembangan pariwisata; masyarakat tidak terlibat langsung dalam usaha pariwisata pun juga bisa memperoleh keuntungan. Dalam pariwisata berbasis masyarakat menuntut pemberdayaan secara politis, demokratis serta distribusi keuntungan kepada masyarakat yang kurang beruntung.

Masyarakat tidak perlu banyak melakukan perubahan karena sesungguhnya kondisi alam, kebudayaan dan kehidupan alami mereka sebagai masyarakat adalah bagian dari daya tarik wisata yang ditawarkan. Namun harus diakui bahwa untuk mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat memerlukan pemberdayaan masyarakat yang sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat secara partisipatif. Dengan begitu masyarakat benar-benar merasa sebagai bagian dari berkepentingan terhadap kelangsungan objek wisata.



BAB III

Exploring Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3.1 Produk Wisata

Produk wisata adalah “keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata yang dipilihnya dan sampai kembali ke rumah di mana ia berangkat semula” (Suswanto, 2007:75). Istilah produk wisata merupakan sesuatu aktivitas traveller yang holistic dalam menikmati sebuah pengalaman berwisata.

Pariwisata yang baik tentunya memiliki destinasi yang berkualitas untuk dikunjungi, juga memiliki unsur komponen penopang yang kuat, sehingga keberlanjutan destinasi tersebut dikunjungi oleh wisatawan tetap lestari. Keberadaan atraksi sebagai menu utama harus juga ditopang dengan penyediaan fasilitas serta kemudahan akses menuju lokasi di mana destinasi wisata tersebut berada. Istilah komponen destinasi ini adalah Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas (3A)

Middleton (2001: 124) mengungkapkan ada tiga komponen utama dari produk wisata, diuraikan sebagai berikut:

a. Atraksi

Elemen-elemen di dalam suatu atraksi wisata yang secara luas menentukan pilihan konsumen dan motivasi calon-calon pembeli di antaranya:

- 1) Atraksi wisata alam, meliputi bentang alam, pantai, iklim dan bentukan geografis lain dari suatu destinasi dan sumber daya alam lainnya.
- 2) Atraksi wisata buatan/binaan manusia, meliputi bangunan dan infrastruktur pariwisata termasuk arsitektur bersejarah dan modern, monumen, trotoar jalan, taman dan kebun, pusat konvensi, marina, ski, tempat kepurbakalaan, lapangan golf, toko-toko khusus dan daerah yang bertema.
- 3) Atraksi wisata budaya, meliputi sejarah dan cerita rakyat (legenda), agama dan seni, teater musik, tari dan pertunjukkan lain, dan



museum. Beberapa dari hal tersebut dapat dikembangkan menjadi event khusus, festival dan karnaval.

- 4) Atraksi wisata sosial, meliputi pandangan hidup suatu daerah, penduduk asli, bahasa dan kegiatan-kegiatan pertemuan sosial.

b. Amenitas/Fasilitas

Terdapat unsur-unsur di dalam suatu atraksi berkenaan dengan suatu atraksi yang memungkinkan pengunjung untuk menginap dan dengan kata lain untuk menikmati dan berpartisipasi di dalam suatu atraksi wisata. Hal tersebut meliputi:

- 1) Akomodasi meliputi hotel, desa wisata, apartement, villa, caravan, hostel, guest house dan sebagainya.
- 2) Restoran, meliputi dari makanan cepat saji sampai dengan makanan mewah.
- 3) Transportasi di suatu atraksi, meliputi taksi bus, penyewaan sepeda dan alat ski di atraksi yang bersalju.
- 4) Aktivitas, seperti sekolah ski, sekolah berlayar dan klub golf.
- 5) Fasilitas-fasilitas lain, misalnya pusat-pusat bahasa dan kursus keterampilan.
- 6) Retail outlet, seperti toko, agen perjalanan, souvenir, produsen camping.
- 7) Pelayanan-pelayanan lain, misalnya salon kecantikan, pelayanan informasi, penyewaan perlengkapan dan kebijaksanaan pariwisata.

c. Aksesibilitas

Elemen-elemen ini adalah yang memengaruhi biaya, kelancaran dan kenyamanan terhadap seorang wisatawan yang akan menempuh suatu atraksi. Elemen-elemen tersebut ialah:

- 1) Infrastruktur;
- 2) Jalan, bandara, jalur kereta api, pelabuhan laut, marina;
- 3) Perlengkapan, meliputi ukuran, kecepatan, jangkauan dari sarana transportasi umum;
- 4) Faktor-faktor operasional seperti jalur/rute operasi, frekuensi pelayanan dan harga yang dikenakan;
- 5) Peraturan Pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan transportasi.



Teori Middleton (2001:124) dilengkapi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tertuang dalam Ripparnas 2010 sampai dengan 2025 Republik Indonesia yang menyebutkan perkembangan produk wisata dikaitkan atas 4 faktor yaitu :

- a. Attraction (daya tarik)
 1. Site attractions (tempat-tempat bersejarah, tempat dengan iklim yang baik, pemandangan indah)
 2. Event Attractions (kejadian atau peristiwa misalnya kongres, pameran, atau peristiwa lainnya).
- b. Amenities (fasilitas) tersedia fasilitas yaitu tempat penginapan, restoran, transport lokal yang memungkinkan wisatawan bepergian, alat-alat komunikasi.
- c. Aksesibilitas adalah tempatnya tidak terlalu jauh, tersedia transportasi ke lokasi, murah, aman dan nyaman.
- d. Tourist organization untuk menyusun kerangka pengembangan pariwisata, mengatur industri pariwisata dan mempromosikan daerah sehingga dikenal banyak orang. Pendapat lain diungkapkan oleh Peter Mason (Poerwanto, 2004: 79) untuk mendukung teori Middleton tentang komponen produk wisata bahwa komponen produk wisata tetap berdasarkan atas tiga komponen utama yaitu attraction (daya tarik), fasilitas wisata (amenities) dan aksesibilitas.

Pada hakikatnya produk wisata ialah keseluruhan rangkaian dari sesuatu yang tidak nyata (tangible), hanya bisa diperoleh dan dirasakan, sehingga bentuk dari produk wisata itu sendiri pada hakikatnya adalah tidak nyata (intangible), karena dalam suatu rangkaian perjalanan terapat berbagai macam unsur yang saling melengkapi, tergantung pada jenis perjalanan tersebut sifatnya bagaimana.

3.1.1 Daya Tarik Wisata

Dalam kegiatan wisata pada dasarnya manusia melakukan pergerakan dari tempat tinggalnya kemudian melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata. Pergerakan atau perpindahan ini hanya bersifat sementara saja, karena manusia akan kembali ke daerah tempat tinggalnya sebelumnya setelah kegiatan wisata selesai. Daerah tujuan wisata haruslah memiliki daya tarik tertentu yang membuat wisatawan tertarik untuk datang berkunjung. Daya tarik wisata tersebut bisa

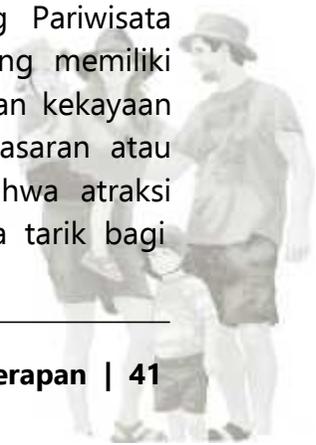


berbagai macam varian. Mulai dari daya tarik karena bentukan alam ataupun hasil karya cipta manusia. Jadi daya tarik menjadi salah satu pendukung pembentukan suatu daerah menjadi tempat tujuan wisata.

Dalam kepariwisataan ada dua hal yang dapat ditawarkan kepada wisatawan, sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung kesuatu daerah tujuan wisata, di mana kedua hal tersebut dapat berupa alamiah atau buatan manusia (Wahab, 2003:110). Sedangkan menurut (Kuncoro, 2001) menyatakan bahwa atraksi wisata dikelompokkan menjadi dua, yaitu atraksi sumber daya alam dan atraksi buatan manusia.

1. Atraksi buatan manusia meliputi atraksi budaya (agama, budaya modern, museum, galeri seni, situs arkeologi, bangunan), tradisi (kepercayaan, animasi budaya, festival) dan peristiwa olahraga (olimpiade, piala dunia, turnamen).
2. Sumber-sumber alam. Atraksi wisata alam adalah tiap ekosistem dan segala isinya. Sumber daya alam fisik dan hayati merupakan atraksi wisata yang dapat dikembangkan untuk objek wisata alam.
 - a. Iklim: udara lembut, bersinar matahari, kering dan bersih.
 - b. Tata letak tanah dan pemandangan alam : dataran, pegunungan yang berpanorama indah, danau, sungai, pantai, bentuk-bentuk yang unik, pemandangan yang indah, air terjun, daerah gunung berapi dan lain-lain.
 - c. Unsur rimba: hutan-hutan lebat, pohon-pohon langka, dan sebagainya.
 - d. Flora dan fauna: tumbuhan aneh, barang-barang beragam jenis dan warna, kemungkinan memancing, berburu dan bersafari foto binatang buas, taman nasional dan taman suaka binatang buas dan sebagainya.
 - e. Pusat-pusat kesehatan: sumber air mineral alam, kolam lumpur berkhasiat untuk mandi, sumber air panas alam untuk penyembuhan penyakit dan sebagainya.

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata disebutkan "Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa atraksi wisata merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan daya tarik bagi



wisatawan dan merupakan alasan utama untuk mengunjungi Objek dan daya tarik wisata. Menurut (Soekardjo, 1997:61) dalam Anatomi Pariwisata mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi perihal atraksi wisata yang baik:

1. Kegiatan (act) dan Objek (artifact) yang merupakan atraksi itu sendiri harus dalam keadaan baik.
2. Karena atraksi wisata itu harus disajikan dihadapan wisatawan, maka cara penyajiannya atau presentasinya harus tepat.
3. Atraksi wisata adalah terminal dari suatu mobilitas spasial, yaitu akomodasi, transportasi dan promosi serta pemasaran.
4. Keadaan di tempat atraksi harus dapat menahan wisatawan cukup lama.
5. Kesan yang diperoleh wisatawan waktu menyaksikan atraksi wisatawan harus diusahakan supaya bertahan selama mungkin.

Selain itu juga terdapat 3 syarat untuk meningkatkan atraksi wisatawan menurut (Yoeti,1985:164) yaitu :

6. Sesuatu yang dapat dilihat (something to see)
7. Sesuatu yang dapat dikerjakan (something to do)
8. Sesuatu yang dapat dibeli (something to buy)

Sehingga pada akhirnya wisatawan memperoleh unsur pembelajaran dari pengalaman (something to learn) dan menjadikan sebuah ingatan yang bisa di share/dibagikan (something to say).

3.1.2 Sarana dan Fasilitas Wisata

Fasilitas wisata ialah pelengkap di suatu destinasi wisata yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang sedang menikmati perjalanan wisata. Fasilitas wisata dibuat untuk mendukung konsep atraksi wisata yang sudah ada. Karena itu selain daya tarik wisata, kegiatan wisata yang dilakukan wisatawan membutuhkan adanya fasilitas wisata yang menunjang kegiatan wisata tersebut. Sehingga pada akhirnya setiap komponen saling berkaitan dalam rangkaian wisata perjalanan mulai dari daya tarik wisata, kegiatan wisata, sampai dengan fasilitas wisata merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (Mill, 2000:24) "Facilities service them when they get there". Fasilitas wisata adalah salah satu hal yang memenuhi kebutuhan dari wisatawan

yang melakukan perjalanan wisata sesampainya mereka di atraksi wisata. Komponen dari fasilitas perjalanan terdiri dari unsur alat transportasi, fasilitas akomodasi, fasilitas makanan-minuman dan fasilitas yang lainnya sesuai dengan kebutuhan perjalanan.

Adapun Fasilitas terbagi sebagai berikut:

1. **Akomodasi.** Akomodasi diperlukan oleh wisatawan yang sedang berkunjung ke atraksi wisata untuk tepat tinggal sementara sehingga dapat beristirahat sebelum melakukan kegiatan wisata selanjutnya. Dengan adanya akomodasi membuat wisatawan untuk betah untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama untuk menikmati Objek dan daya tarik wisata. Hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi wisata sangat memengaruhi wisatawan untuk berujung seperti pilihan akomodasi, jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat harga, serta jumlah kamar yang tersedia.
2. **Tempat Makan dan Minum.** Tentu saja dalam melakukan kunjungan ke tempat wisata para wisatawan yang datang memerlukan makan dan minum sehingga perlu disediakannya pelayanan makanan dan minuman. Hal tersebut mengantisipasi bagi para wisatawan yang tidak membawa bekal saat melakukan perjalanan wisata. Makanan khas daerah wisata dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang. Hal ini perlu dipertimbangkan yaitu jenis makanan dan minuman, higienis, pelayanan, harga, bahkan lokasi pun menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
3. **Fasilitas umum di lokasi wisata.** Fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas penunjang tempat wisata seperti toilet umum, tempat parkir, musala, dan sebagainya. Pembangunan fasilitas wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Fasilitas wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah fasilitas wisata yang disediakan, dan secara kualitatif menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan tercermin pada kepuasan wisatawan.

Syarat-syarat fasilitas yang baik sebagai berikut:

1. Bentuk dari fasilitas harus dapat dikenal (recognizable)
2. Pemanfaatan fasilitas harus sesuai dengan fungsinya
3. Fasilitas harus strategis, di mana pengunjung dapat menemukan dengan mudah.



4. Kualitas dan fasilitas itu sendiri harus sesuai dengan standar-standar yang berlaku dalam kepariwisataan.

3.1.3 Aksesibilitas Wisata

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang membantu mempermudah perjalanan wisata para wisatawan yang akan berkunjung ke tempat atraksi wisata. Menurut (Sammeng, 2000:36), salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan pariwisata adalah aksesibilitas atau kelancaran perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan tersebut bisa berjarak dekat maupun berjarak jauh.

Komponen aksesibilitas dikategorikan ke dalam dua sifat dasar oleh (Hainim,1999:21) yaitu sifat fisik dan non fisik. Aksesibilitas yang bersifat fisik dapat dikategorikan ke dalam suatu bentuk kemudahan-kemudahan yang tersedia menyangkut ketersediaan prasarana dan sarana jaringan transportasi yang menghubungkan antara satu daerah tujuan wisata dengan daerah asal wisatawan, baik dalam bentuk sarana transportasi berjadwal (schedule transport) ataupun yang tidak berjadwal (nonscheduled transport). Sementara aksesibilitas yang bersifat non fisik, menyangkut suatu bentuk kemudahan pencapaian melalui jalur perizinan atau permit, biasanya aksesibilitas dalam kategori non fisik ini ditujukan bagi daerah tujuan wisata yang dilindungi dan dibatasi frekuensi maupun kuantitas kunjungannya.

Transportasi juga memasukan transportasi service ke dalam bagian dari kemudahan bagi wisatawan dalam hal aksesibilitas. Hodder &Stoughton, (2002:22) "Transport service are needed to allow visitors to get to destination, and to move around once they are there. Transport services include the provision of infrastructure, such as new roads or facilities such as charter flight".

3.2 Ekonomi Kreatif

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai buah dari usaha ekonomi nasional yang mandiri, maka mengembangkan industri pariwisata beserta industri kreatifnya merupakan suatu keharusan di masa sekarang. Pengembangan industri ini sangat dimungkinkan mengingat begitu kayanya Indonesia dengan banyaknya ragam pesona, mulai dari alam, sejarah, hingga budaya.



Semua daya pesona itu tentu tidak begitu saja member nilai tambah bila kemudian tidak diiringi dengan usaha menggugah minat pasar untuk mengunjungi serta menikmati berbagai objek wisata serta hasil industri kreatif yang ada. Di antara usaha untuk menarik minat pasar itu adalah adanya insentif dari industri pariwisata secara periodik dan berkelanjutan untuk mengadakan pameran kreativitas industri dan karya anak bangsa dari berbagai daerah dengan memperkenalkan dan mempromosikannya ke berbagai negara di dunia.

Ada persyaratan untuk bisa menyelenggarakan atau terselenggaranya pameran kreativitas ini, diantaranya adalah meningkatkan jalinan hubungan untuk memperkuat komitmen bersama sebagai pemangku kepentingan dari industri pariwisata, yaitu kalangan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kebersamaan ketiga unsur ini dalam pengembangan industri pariwisata beserta industri kreatif di dalamnya memiliki posisi yang sangat menentukan karena keterkaitannya secara langsung terlibat dalam berbagai aktivitas kepariwisataan. Mengingat bahwa lahirnya sebuah kebijakan pemerintah kemudian diiringi dengan usaha melakukan pelayanan yang profesional dari pihak swasta serta hadirnya dukungan berupa partisipasi kreatif dari masyarakat, maka dengan sendirinya akan terakselerasi gerakan kepariwisataan nasional.

3.2.1 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada tingkat global, kesadaran akan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif sudah lama ada, tetapi kesadaran itu menguat ketika pada tahun 2008 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan laporan berjudul "Creative Economy Report 2008".

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif. Hal itu tampak ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa **ekosistem ekonomi kreatif** adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu **kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi**, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah



pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Undang-undang ekonomi kreatif bertujuan: a. mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global; b. menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara; c. menciptakan **ekosistem ekonomi kreatif** yang berdaya saing global; d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal; e. mengoptimalkan potensi **pelaku ekonomi kreatif**; f. melindungi hasil kreativitas **pelaku ekonomi kreatif**; dan g. mengurusutamakan ekonomi kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Setiap **pelaku ekonomi kreatif** berhak memperoleh dukungan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan **ekosistem ekonomi kreatif** yang menjadi pelaku dalam ekonomi kreatif dibagi menjadi 2 yakni pelaku ekonomi kreatif terdiri atas: a. pelaku kreasi; dan b. pengelola kekayaan intelektual.

Sejenak mengingat kebelakang awal munculnya nomenklatur ekonomi kreatif menetapkan tahun 2009 lalu sebagai tahun **ekonomi kreatif** dan mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif sebelum diubahnya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada secara implisit di bawah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2009 tersebut dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Kreatif Tahun 2009- 2025.

Berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2009 tersebut yang dimaksud ekonomi kreatif adalah ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusianya sebagai factor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Jadi ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas dan pengetahuan serta informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia sebagai aktor utamanya. Ekonomi kreatif, dengan demikian, mempunyai lingkup yang sangat luas dan punya keunggulan yaitu tidak akan kehabisan bahan baku seperti hal kegiatan ekonomi lain seperti industri. Terbukti pula kegiatan ekonomi kreatif tahan terhadap hujaman krisis ekonomi.

Kaitan antara ekonomi kreatif dan pariwisata sangatlah besar. Jika industri kreatif dikemas dan dikembangkan bersamaan dengan penataan industri pariwisata, maka dampaknya akan sangat signifikan. Apalagi, sektor-sektor ini memiliki kaitan dengan sektor lain yang cukup besar. Atau, nilainya dalam mata rantai industri (value chain) sangat penting.

Bayangkan saja, bila ada pengembangan kawasan pariwisata di daerah tertentu, maka berbagai sektor akan menggeliat sekaligus, mulai dari pengembang properti, hotel, restoran, bisnis transportasi dan bandara, serta infrastrukturnya sendiri. Contohnya, bila kawasan terpadu pariwisata, maka daerah-daerah sekitar akan berkembang pesat.

Bukan saja kelompok bisnis besar yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Misalnya saja para perajin souvenir, atau pedagang asongan dan kaki lima yang juga pasti berkembang. Belum lagi tenaga kerja yang terserap di berbagai industri, seperti hotel, restoran dan juga proyek pembangunan infrastruktur kawasan sendiri. Pendek kata, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa mendorong akselerasi pembangunan yang disertai dengan pemerataan. Itulah esensi dari prinsip tumbuh dengan seimbang (growth with equity).

Era globalisasi dan konektivitas mengubah cara bertukar informasi, berdagang dan konsumsi dari produk-produk budaya dan teknologi dari berbagai tempat di dunia. Dunia menjadi tempat yang sangat dinamis dan kompleks sehingga kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tak ternilai dalam kompetisi dan pengembangan ekonomi. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Konsep ini telah memicu ketertarikan berbagai negara untuk melakukan kajian seputar ekonomi kreatif dan menjadikan ekonomi kreatif model utama pembangunan ekonomi.

Pertama kali istilah Definisi industri kreatif di Indonesia seperti yang tertulis dalam cetak biru pengembangan ekonomi kreatif nasional 2009-2015 (2008) adalah: " Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut."



Dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.

3.2.2 Sub Sektor Ekonomi Kreatif

1) Periklanan (advertising)



Definisi periklanan menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising materials atau samples, serta penyewaan kolom iklan.
- b) Segala bentuk pesan tentang suatu produk disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.
- c) Deskripsi ataupun presentasi dari produk, ide ataupun organisasi untuk membujuk individu untuk memberi, mendukung atau sepakat atas suatu hal.

2) Arsitektur



Definisi jasa arsitektur menurut klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2005 adalah jasa konsultasi arsitek, yaitu mencakup usaha seperti: desain bangunan, pengawasan konstruksi, perencanaan kota dan sebagainya. Selain itu sub sektor arsitektur yaitu kegiatan

kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh baik dari level makro (town planning, urban design, lanskap architecture) sampai level mikro (detail konstruksi). Misal arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika dan elektrikal.

3) Seni Rupa



Yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, pasar tradisional dan internet, meliputi barang-barang musik, peretakan, kerajinan, automobile, dan film.

4) Kriya (craft)



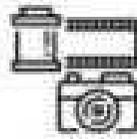
Industri kreatif subsektor kerajinan adalah kegiatan kreativitas yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengerajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Berdasarkan bahan baku (raw material), produk kerajinan dikategorikan menjadi:

- a) Keramik (seperti tanah liat, earthen ware, pottery, stoneware, porcelain)
- b) Logam (seperti emas, perak, perunggu, besi, tembaga)
- c) Natural fiber, serat alam (bambu, akar-akaran, rotan)



- d) Batu-batuan (seperti batu mulia, semi precious stone, jade)
- e) Tekstil (seperti cotton, sutra, linen)
- f) Kayu (seperti seni ukiran dan lacquerware)

5) Fotografi



Fotografi

Yaitu kegiatan yang sedang digandrungi kaum anak muda milenial. Tingginya minat tersebut disebabkan kebutuhan terhadap pengakuan/esteem needs didukung oleh semakin berkembangnya sosial media dan harga piranti fotografi yang semakin terjangkau dan mumpuni kualitasnya.

6) Fesyen (fashion)



Industri kreatif subsektor fesyen/mode adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.

7) Film, Animasi dan Video



Film, Animasi
Video

Industri Kreatif subsektor film, animasi dan video adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi, produksi film, animasi dan pembuatan video, serta distribusi rekaman video, film dan animasi. Termasuk didalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron dan eksibisi film.

8) Aplikasi dan pengembangan permainan (apps &game)



Industri kreatif subsektor permainan interaktif adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi aplikasi dan permainan komputer & telepon pintar/smartphone dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Sub sektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.

Layanan komputer, smartphone dan piranti lunak meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal.

Seiring dengan semakin meningkatnya penetrasi telepon pintar di Indonesia, industri pengembangan aplikasi dan permainan di tanah air pun semakin meningkat. Menurut beberapa sumber, industri permainan interaktif didefinisikan sebagai permainan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Berbasis elektronik baik berupa aplikasi software pada komputer (online maupun stand alone), console (playstation, Xbox, Nintendo, dll, mobile Handset dan arcade.
- b) Bersifat menyenangkan (fun) dan memiliki unsur kompetisi (competition)
- c) Memberikan feedback/interaksi kepada pemain, baik antar pemain atau pemain dengan alat (device)
- d) Memiliki tujuan atau dapat membawa satu atau lebih konten atau muatan. Pesan yang disampaikan bervariasi misalnya unsur edukasi, entertainment, promosi produk (advertisement) sampai kepada pesan yang destruktif.



9) Musik



Industri kreatif subsektor musik adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi. Komposisi, pertunjukan musik, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Seiring dengan perkembangan industri musik ini yang tumbuh sedekian pesatnya, maka Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia 2005 (KBLI) perlu dikaji ulang, yaitu terkait dengan pemisahan lapangan usaha distribusi reproduksi media rekaman, manajemen-representasi-promosi (agensi) musik, jasa komposer, jasa pencipta lagu dan jasa penyanyi menjadi suatu kelompok lapangan usaha sendiri.

10) Seni Pertunjukan (showbiz)



Industri kreatif kelompok seni pertunjukan meliputi kegiatan kreatif berhubungan dengan usaha yang berkaitan dengan pengembangan konten, produksi pertunjukan, pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik-tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung dan tata pencahayaan.



11) Penerbitan dan Percetakan



Industri kreatif subsektor penerbitan dan percetakan meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid dan konten digital serta kegiatan kantor berita.

12) Televisi & Radio (broadcasting)



Industri Kreatif kelompok televisi dan radio meliputi kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan, penyiaran dan transmisi televisi dan radio.

13) Desain Produk



Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, materi baru, alat baru, metode baru dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar; termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra dan seni; serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.



14) Kuliner



Kegiatan kreatif ini termasuk baru, ke depan direncanakan untuk dimasukkan ke dalam sektor industri kreatif dengan melakukan sebuah studi terhadap pemetaan produk makanan olahan khas Indonesia yang dapat ditingkatkan daya saingnya di pasar ritel dan pasar internasional.

Studi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin mengenai produk-produk makanan olahan khas Indonesia, untuk disebarluaskan melalui media yang tepat, didalam dan luar negeri, sehingga memperoleh peningkatan daya saing di pasar ritel modern dan pasar internasional. Pentingnya kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa Indonesia memiliki warisan budaya produk makanan khas, yang pada dasarnya merupakan sumber keunggulan komparatif bagi Indonesia

15) Desain Interior



Kegiatan kreatif di dua dekade terakhir ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, penggunaan jasa desainer untuk merancang interior hunian, restoran, hotel hingga perkantoran semakin meningkat. Apresiasi masyarakat terhadap bidang ini juga semakin baik.

16) Desain Komunikasi Visual (DKV)



Merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dengan memanfaatkan elemen visual sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. DKV memiliki peranan yang penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis swasta, pemilik merek, bahkan program-program pemerintah.

3.2.3 Ekonomi Kreatif dan Pembangunan Pariwisata

Sebagai negara dengan banyak potensi sumber daya dengan banyak pulau dan etnis, Indonesia menawarkan keanekaragaman daya tarik alam dan budaya dalam pembangunan pariwisata.

Pariwisata telah mengalami banyak perkembangan yang berarti di Indonesia, namun mengalami berbagai masalah karena pengembangan pariwisata masih lebih didominasi terpusat di Pulau Bali dan Pulau Jawa. Dengan demikian manfaat pembangunan pariwisata kurang dapat dinikmati wilayah lain; disebabkan oleh berbagai hal antara lain bencana alam, keamanan, dan gejala politik serta belum optimalnya dan pemberdayaan nilai-nilai kreativitas yang diintegrasikan dalam pariwisata itu sendiri. Hal ini mengakibatkan penurunan (kejenuhan) kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan wilayah tertentu di tanah air.

Untuk dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia perlu pendekatan pengintegrasian **pariwisata dan ekonomi kreatif** dengan perencanaan yang komprehensif guna dapat membangun pariwisata Indonesia di seluruh wilayah atau kawasan yang mempunyai potensi. Perencanaan pembangunan pariwisata disusun berdasarkan rencana jangka panjang, menengah dan pendek secara rinci tentang wilayah atau kawasan khusus dengan penetapan skala prioritas, strategi pembangunan khusus yang potensial. Di setiap daerah diupayakan adanya kawasan khusus pariwisata berupa kawasan wisata satelit, beberapa di antaranya resort-resort wisata terpadu.

Ekonomi kreatif dan sektor wisata merupakan dua hal yang saling berpegaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik (ooi, 2006). Konsep kegiatan wisata dapat didefinisikan dengan tiga faktor, yaitu harus ada **something to see, something to do, dan something to buy** (Yoeti, 1985) serta perlu juga ditambahkan **something to learn dan something to say**.

Something to see terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata, **something to do** terkait dengan aktivitas wisatawan di daerah wisata.

Something to buy terkait kerajinan tangan khas yang dapat dibeli di daerah wisata sebagai benda memorabilia wisatawan.

Something to learn adalah sesuatu yang bisa dipetik sebagai suatu pembelajaran wisatawan berkaitan dengan interaksi sosial budaya di destinasi wisata.

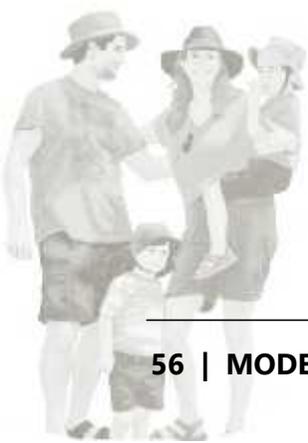


Something to say adalah pengalaman terbaik yang diperoleh wisatawan yang dapat diceritakan saat wisatawan kembali ke tempat asalnya sebagai sebuah kenangan yang melekat.

Dalam empat komponen tersebut, ekonomi kreatif dapat masuk melalui **something to buy** dan **something to learn** dengan menciptakan produk-produk inovatif khas daerah.

Pada era tradisional, souvenir yang berupa memorabilia hanya terbatas pada foto polaroid yang menampilkan foto sang wisatawan di suatu objek wisata tertentu.

Agar dapat menarik para wisatawan ke daerah tujuan wisata maka para pengusaha yang menyediakan produk wisata harus mengelola produk yang ditawarkan dengan baik. Dan karena produk wisata tidak dapat berdiri sendiri, maka diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik di antara para pemangku kepentingan dalam pariwisata.



BAB IV Penerapan Pariwisata Bertanggung Jawab

4.1 Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dengan pengertian tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam kegiatan kepariwisataan adalah sekelompok orang yang melakukan wisata, serta menggunakan kemudahan-kemudahan yang dapat menunjang kegiatan wisata tersebut.

Adapun kegiatan wisata yang dapat dilakukan sekelompok orang tersebut ialah kegiatan melakukan kenikmatan, kesenangan, keindahan alam semesta serta lingkungannya yang lain dari kegiatan yang setiap hari dialami oleh sekelompok orang tersebut.

Penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun tren menunjukkan perkembangan yang sangat pesat (sebelum pandemi novel corona virus/covid-19). Hal ini disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan,



serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan demografi.

Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pengembangan pariwisata pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki kultur penduduk fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara. Pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada penembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Dalam pelaksanaannya pembangunan kepariwisataan.

Pariwisata dapat menjadi sektor pendapatan utama jika objek dan daya tarik wisata yang dimiliki suatu destinasi tersebut dikelola dengan baik dan benar. Baik itu dari segi atraksi, amenities dan aksesibilitas (3A) sehingga perpaduan dari 3 komponen tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi. Seperti yang dikatakan oleh Burkat & Medlik (1988:232) yaitu "Tourism is the sum of the phenomena and relationship arising from the travel and stay of non resident, in so far as they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity". Atau dengan kata lain pariwisata adalah sebuah fenomena yang timbul dari perjalanan (individu), tinggal sementara atau tidak menetap serta tidak bertujuan untuk mencari pendapatan selama kunjungan tersebut.



Konsep pengembangan pariwisata dapat diturunkan kedalam konsep pengembangan daya tarik wisata. Pengembangan daya tarik wisata ialah "sebuah proses jangka panjang dalam mempersiapkan kunjungan wisatawan yang melibatkan perencanaan dan pengelolaan terhadap komponen-komponen pariwisata seperti atraksi, aksesibilitas, akomodasi, fasilitas dan pelayanan". (Fridgen, 1991).

Pembangunan berkelanjutan menurut Rees (1989:13) dalam Gunn (1994:85) adalah "Positive socio economic change that does not undermine the ecological and social system upon which communities and societies are dependent". Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan keberlangsungan antara perubahan sosial ekonomi, ekologi dan lingkungan sosial. Dalam arti luas, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa merusak atau mengurangi nilai sumber daya yang ada sehingga masyarakat merasakan hasil dari pembangunan tersebut secara berkelanjutan.

McIntyre (1993:75) France (1997:87) dalam Marsongko (2001), mendefinisikan pariwisata yang berkelanjutan sebagai berikut, "suatu model pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal untuk jangka pendek dan jangka panjang; memberikan pelayanan dan kualitas pengalaman yang baik kepada pengunjung dan menjaga kualitas lingkungan untuk mencapai dua hal sebelumnya".

Menurut The World Conservation Union (IUCN) Konsep pembangunan yang berkeajaotan adalah, "proses pembangunan yang tidak merusak atau tidak menurunkan kualitas sumber daya di mana hal tersebut dapat dicapai melalui pengelolaan lingkungan, sehingga sumber daya dapat diperbaharui pada tingkat pemanfaatan tertentu dan pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan masa yang datang" McIntyre (1993):122) Cooper et al (1996:139) dalam Marsongko (2001).

Pengembangan pariwisata berkelanjutan menurut World Commission on Environment dalam McKercher (2003) adalah "Sustainable tourism development which leads to management all resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be filled while maintaining cultural integrity, essential ecology processes, biological diversity and life support systems". Konsep ini merupakan bahwa, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan merupakan sebagai suatu konsep manajemen yang perlu dilaksanakan



sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pariwisata dengan perlindungan sumber daya lingkungan dan juga pengembangan pariwisata memperhatikan keseimbangan antara empat elemen yaitu ekonomi, ekologi, budaya dan masyarakat setempat.

Maka di dalam proses manajemen diperlukan sebuah fungsi kontrol untuk mengawasi pembangunan pariwisata supaya terus mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Nelson, Butler, Wall (1993:14) terdapat beberapa indikator untuk memudahkan didalam mengawasi pembangunan pariwisata tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Elemen sosial, yaitu dari:

1. Masyarakat

- a. Kuantitas dan kualitas mata pencaharian
- b. Perpindahan masyarakat dari dalam dan ke luar
- c. Keluhan mengenai kegiatan pariwisata

2. Wisatawan

- a. Jumlah pengunjung dan tren
- b. Proporsi wisatawan yang sering datang
- c. Lama tinggal
- d. Kepuasan dan keluhan wisatawan

3. Lembaga

- a. Hukum dan Peraturan Pariwisata
- b. Tanggapan organisasi pemerintah terhadap pariwisata
- c. Keberadaan perencanaan pariwisata
- d. Adanya Kode Etik untuk Industri Pariwisata

b. Elemen EKonomi, yang terdiri dari :

1. Masyarakat

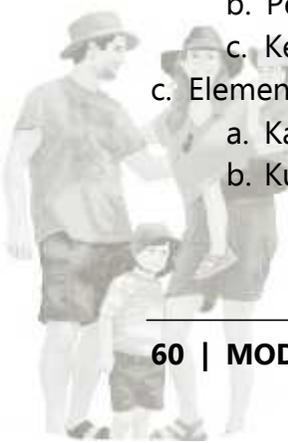
- a. Pendapatan dari kegiatan pariwisata dan siapa yang menerima
- b. Biaya dan siapa yang mendanai
- c. Investasi masyarakat dalam pariwisata

2. Industri Pariwisata

- a. Keuntungan dan kerugian
- b. Perulaan kegiatan industri
- c. Kebangkrutan industri

c. Elemen Ekologi, yang terdiri dari:

- a. Karakteristik Demografi
- b. Kualitas, Kuantitas dan Penggunaan Air



- c. Kualitas Udara
- d. Pembuangan Limbah
- e. Praktik Daur Ulang
- f. Efisiensi Penggunaan Sumber daya
- g. Penurunan Kualitas Pemandangan

Indikator-indikator tersebut pada dasarnya harus dikontrol oleh semua yang berkepentingan dengan pariwisata atau disebut dengan stakeholders yang saling terkait. Selanjutnya menurut Adler (2002:15) tiga stakeholders yang saling terkait di antaranya yaitu:

- a. Pemerintah daerah setempat, di mana pemerintah melihat pariwisata sebagai suatu indikator kesejahteraan ekonomi di dalam daerah-daerah mereka. Sudut pandang mereka berhubungan dengan pendapatan yang didapat oleh warga mereka dari bisnis ini. Pemerintah juga mempertimbangkan pendapatan dari pertukaran mata uang asing dari wisatawan Internasional, selain penerimaan pajak dari pengeluaran wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung
- b. Pelaku bisnis, di mana pelaku bisnis melihat pariwisata sebagai peluang untuk meraih keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang diinginkan oleh pasar wisatawan.
- c. Masyarakat Lokal di mana, masyarakat lokal biasanya melihat pariwisata sebagai sebuah faktor budaya dan lapangan kerja. Salah satu kepentingan dari hal ini adalah dampak dari interaksi antara sejumlah besar wisatawan asing dan masyarakat lokal. Dampak ini bisa menguntungkan atau merugikan, bahkan keduanya.

Dari ketiga stakeholders tersebut diharapkan dapat menjadi suatu kesatuan yang menjadi penggerak pengembangan pariwisata.

4.2 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan, adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan,



pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, sehingga saat ini konsep pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholders*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitoring dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.



Gambar 7. Indonesia Sustainable Tourism Frameworks Sumber: CEO Message #52 Sustainable Tourism Development Kemenpar 2019

Sustainable Tourism Observatory

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengembangkan Sustainable Tourism Development (STD) dengan membentuk Sustainable Tourism Observatory (STO), kedua di Asia setelah China. Program tersebut memberikan pendamping kepada destinasi wisata, sehingga pariwisata memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Pendampingan ini diharapkan agar kemanfaatan itu bisa terus berlangsung dan dijaga.

Program ini sejalan dengan program United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Di mana saat ini telah ada 18 destinasi pariwisata internasional terdaftar sebagai lokasi STO di UNWTO, 5 di antaranya berada di Indonesia. 5 daerah tersebut adalah percontohan yang bertujuan memberi gambaran bahwa Indonesia tidak hanya Bali tapi juga ada destinasi lain yang pariwisatanya berkelanjutan. Daerah percontohan tersebut adalah Pangandaran (Jabar), Sleman (DIY), dan Sesaot Lombok (NTB), kemudian disusul dengan Samosir/Danau Toba (Sumut), dan Sanur (Bali).

Sleman bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, Pangandaran bekerjasama dengan ITB, Sanur bekerjasama dengan Universitas Udayana, Sesaot Lombok bekerjasama dengan Universitas Mataram, dan Pangururan Samosir bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara. Tiga dari lima pusat monitoring, yakni ITB, UGM, dan Unram telah diakui oleh UNWTO. Wonderful Indonesia Network Sustainable Tourism Observatory (WINSTO) yang merupakan bagian dari International Network Sustainable Tourism Observatory (INSTO) merupakan wadah dari pusat monitoring tersebut.

Prospek cerah telah ditunjukkan oleh lima STO ini. Contoh Praktik baik dari Sleman misalnya, STO tersebut terdiri dari dua desa wisata, yaitu Desa Wisata Pulesari dan Desa Ekowisata Pancoh. Pada tahun 2016 Desa Wisata Pulesari berhasil menarik 52.947 wisatawan. Angka tersebut menghasilkan pendapatan total sebesar Rp2.166.412.000. Sedangkan Desa Ekowisata Pancoh di tahun 2016 berhasil menarik 2.784 wisatawan, dengan total pendapatan sebesar Rp1.000.000.000,-

Sebagai destinasi wisata berbasis Pariwisata Berkelanjutan keduanya mengandalkan penduduk lokal desa dalam pengelolaannya. Untuk itu pendampingan serta pelatihan diberikan sehingga masyarakat mampu mandiri. Begitu juga dengan STO lainnya.



4.3 Praktik Alam

Kekayaan alam merupakan suatu aset yang potensial dan menguntungkan, jika dikelola dengan cara-cara yang tepat dan proporsional. Dengan pendekatan penggunaan "pariwisata" sebagai instrumen pemberdayaan kekayaan alam, maka dengan prinsip-prinsip pengelolaan wisata alam secara konservasi dapat lestari.

Kekayaan alam yang berlimpah dan ekosistem yang unik, spesifik dapat diketemukan pada daratan misalnya pegunungan, danau, waduk, lembah dan ngarai; perairan misalnya: sungai, danau waduk dan rawa; serta perairan laut. Fandeli (2001).

Pada hakikatnya setiap ekosistem dengan segala isinya baik sumber daya alam fisik dan hayati, merupakan daya tarik wisata yang dapat dikemas dan dikembangkan menjadi objek wisata alam. Karena dengan kegiatan wisata alam yang sangat banyak macam ragamnya membutuhkan atraksi dan objek wisata alam yang juga memiliki banyak pilihan ragam.

Daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata budaya bisa menjadi pengungkit yang satu sama lain dapat dikemas menjadi suatu paket wisata yang meningkatkan daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata budaya. Untuk dapat menikmati benda budaya dapat dilakukan serangkaian kunjungan kepada objek yang beraneka ragam, hal ini dilakukan agar dapat menarik wisatawan yang berulang dan lebih lama tinggal di destinasi wisata, maka perlu membuat penyajian objek yang beragam dan bervariasi.

4.4 Ekowisata Pada Kawasan yang Dilindungi

Ekowisata didefinisikan sebagai sebuah perjalanan ke daerah-daerah yang masih alami yang dapat memelihara, menjaga naturalitas, mengkonservasi dan memelihara keberlangsungan tata kehidupan masyarakat setempat. Para traveller dapat mempelajari dan memperoleh pengetahuan dan saling bertukar pengalaman di tempat yang dikunjunginya tersebut baik mengenai alam, satwa, maupun kehidupan masyarakat lokal setempat.

Ekowisata secara dramatis telah mendapatkan perhatian banyak orang. Para pengelola kawasan yang dilindungi mencoba untuk mengakomodir jumlah pengunjung yang meningkat di taman wisata



dan suka-suka. Masyarakat didekat kawasan yang dilindungi mengalami peluang pekerjaan baru melalui pariwisata.

Ahli pengembangan pedesaan menyelidiki potensi ekonomi dari ekowisata dan pemerintah sedang mempertimbangkannya sebagai salah satu sumber devisa. Para pejabat biro pariwisata sedang memulai untuk menciptakan kebijakan-kebijakan ekowisata, badan-badan swasta yang bergerak dibidang pendanaan mengevaluasi kemampuan keuangan dari penanaman modal, untuk ekowisata.

Industri ekowisata tengah mengalami ledakan dengan perjalanan alami, pagelaran ekowisata. Penulis-penulis perjalanan berlomba-lomba untuk mendapatkan kata terakhir pada konsep baru ini, video terkait ekowisata banyak dibuat. Dan tentu saja, para pelancong-pelancong utama dibalik semua antusias ini, menjadi lebih berpartisipasi rasa mereka melancong. Para pelancong mengunjungi taman-taman dan suka di seluruh dunia yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya dan mencari pengalaman-pengalaman ini sebagai suatu cara untuk mengetahui dan menghargai lingkungan alam.

Dan apa minat para ahli konservasi pada perkembangan cepat ekowisata ini? Ahli konservasi ingin memastikan apakah ekowisata adalah suatu alat yang sah untuk mengawetkan keanekaragaman hayati dan memajukan pembangunan berkelanjutan. Hipotesis ini perlu diterima atau ditolak melalui studi-studi kasus.

Terdapat suatu harapan yang tinggi diantara pengelola ekowisata tentang apa yang dihasilkan untuk ekowisata. Terdapat pula kekhawatiran yang cukup besar mengenai tantangan-tantangan yang diciptakannya. Dampak teoritis dari ekowisata telah diketahui dengan baik. Biaya potensial meliputi penurunan kualitas lingkungan ketidakseimbangan dan ketidakstabilan ekonomi dan perubahan sosial budaya yang negatif. Manfaat potensial adalah penyediaan dana untuk kawasan-kawasan dilindungi, penciptaan lapangan kerja untuk orang-orang yang tinggal didekat kawasan yang dilindungi dan memajukan pendidikan lingkungan dan pendidikan konservasi.

Dengan manfaat dan biaya yang potensial terdapat berbagai tanggapan tentang ekowisata. Kita melihat peluang-peluang dalam ekowisata yang dapat meningkatkan usaha-usaha kita, serta permasalahan-permasalahan ekowisata yang dapat menghambat pekerjaan kita. Tugas kita sekarang adalah untuk melihat di mana

pekerjaan ekowisata bertemu dengan pembangunan dan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meminimalkan biaya serta memaksimalkan manfaat.

Terdapat beberapa bidang di mana ekowisata bertemu dengan upaya-upaya konservasi. Di World Life Fund (WWF), bidang-bidang ini meliputi; pengelolaan kawasan dilindungi, pembangunan berkelanjutan di daerah pegunungan Pendidikan Lingkungan untuk konsumen dan memengaruhi keputusan-keputusan kebijakan.

Salah satu titik temu terpenting adalah dalam pengelolaan kawasan konservasi. Situasi saat ini dapat dikatakan tidak baik. Kawasan-kawasan dilindungi diseluruh dunia telah mengalami kenaikan tingkat kunjungan. Bebarapa dari kenaikan ini dua kali atau tiga kali lebih cepat dalam setahun, dan banyak dari daerah-daerah ini tidak siap untuk pariwisata. Staf yang bukan orang-orang yang terlatih dalam pengelolaan pariwisata.

Selain dari menghadapi tantangan-tantangan pengelolaan yang baru ini, taman-taman yang sama juga kekurangan dana, kekurangan staf serta mengalami kegiatan pembangunan yang ada dan sekitar batas-batasnya. Semua faktor ini mengancam konservasi kawasan-kawasan yang dilindungi, sebagian ancaman dapat dikurangi jika manfaat potensial dari pariwisata dapat dimanfaatkan secara terkendali. Untungnya, kebanyakan wisatawan ekowisata memiliki keinginan untuk memberikan lebih dari apa yang saat ini diminta dari mereka untuk menyelamatkan kawasan-kawasan yang mereka kunjungi. Orang ingin memainkan peranan yang lebih besar dalam konservasi pada saat melancong. Tetapi, peluang-peluang ini adalah sistem biaya masuk, penginapan-penginapan yang dimiliki dan dikelola setempat atau koperasi kerajinan tangan asli. Untuk menyediakan semua peluang ini, sistem-sistem harus diterapkan, dan ini memerlukan perencanaan.

4.5 Hutan Sebagai Alternatif Wisata Minat Khusus

Pariwisata sebagai industri pelesir maupun rekreasi tak luput dari terpaan sebagai penyumbang menurunnya kualitas lingkungan. Sejak 1970an, organisasi konservasi mulai melihat ekowisata (pariwisata Minat Khusus) sebagai alternatif ekonomi yang berbasis konservasi karena tidak merusak alam ataupun tidak "ekstraktif" dengan berdampak negatif terhadap lingkungan seperti penebangan dan pertambangan.



Ekowisata juga dianggap sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Namun, agar ekowisata tetap berkelanjutan, perlu tercipta kondisi yang memungkinkan di mana masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha ekowisata, mengatur arus dan jumlah wisatawan, dan mengembangkan ekowisata sesuai visi dan harapan masyarakat untuk masa depan. Ekowisata dihargai dan dikembangkan sebagai salah satu program usaha yang sekaligus bisa menjadi strategi konservasi dan dapat membuka alternatif ekonomi bagi masyarakat. Dengan pola ekowisata, masyarakat dapat memanfaatkan keindahan alam yang masih utuh, budaya, dan sejarah setempat tanpa merusak atau menjual isinya.

Ekowisata yang dikembangkan di kawasan konservasi adalah ekowisata yang "HIJAU dan ADIL" untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan yang dilindungi, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak (terutama bagi masyarakat yang lahan dan sumberdaya alamnya berada di kawasan yang dilindungi), dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis dan nilai sejarah yang tinggi. Sejumlah kriteria yang diperlukan antara lain:

- a. Prinsip daya dukung lingkungan diperhatikan di mana tingkat kunjungan dan kegiatan wisatawan pada sebuah daerah tujuan ekowisata dikelola sesuai dengan batas-batas yang dapat diterima baik dari segi alam maupun sosial-budaya.
- b. Sedapat mungkin menggunakan teknologi ramah lingkungan (listrik tenaga surya, mikrohidro, biogas, dll.)
- c. Mendorong terbentuknya "ecotourism conservancies" atau kawasan ekowisata sebagai kawasan dengan peruntukan khusus yang pengelolaannya diberikan kepada organisasi masyarakat yang berkompeten.

Sarana dan penyediaan jasa pendukung dalam mengembangkan ekowisata yang bernilai konservasi dan ekonomi tinggi juga menjadi perhatian dalam pengembangan.



Keberhasilan dalam menciptakan nilai ekonomis pariwisata juga tidak terlepas dari adanya pemahaman pemasaran produk ekowisata. Ada dua aspek yang sangat terkait dan perlu dibahas secara bersamaan jika ingin mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat sebagai satu usaha yang berhasil. Usaha harus layak secara ekonomi, menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk masyarakat setempat, dan dikelola secara profesional. Kemudian, usaha tersebut perlu adil, bermanfaat buat masyarakat lokal sebagai mitra utama, dan mendukung konservasi secara nyata.

Aspek organisasi dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata juga menjadi isu kunci: pentingnya dukungan yang profesional dalam menguatkan organisasi lokal secara kontinyu, mendorong usahayang mandiri dan menciptakan kemitraan yang adil dalam pengembangan ekowisata. Peran organisasi masyarakat sangat penting oleh karena masyarakat adalah stakeholder utama dan akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pengembangan dan pengelolaan ekowisata.

Koordinasi antar stakeholders juga perlu mendapatkan perhatian. Salah satu model percontohan organisasi pengelolaan ekowisata yang melibatkan semua stakeholders termasuk, masyarakat, pemerintah daerah, UPT, dan sektor swasta. Terbentuknya forum atau dewan pembina akan banyak membantu pola pengelolaan yang adil dan efektif terutama di daerah di mana ekowisata merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat.

Pada akhirnya manfaat yang diperoleh dari pariwisata konsep ekowisata/ Model Pariwisata era Green Planet adalah dapat memberikan banyak peluang untuk memperkenalkan kepada wisatawan tentang pentingnya perlindungan alam dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal di samping manfaat ekonomi dan perlindungan alam, sosial, budaya dan ekologi.

Memperhatikan kondisi kepariwisataan global yang berkembang sangat pesat didorong oleh adanya mass tourism. Namun, pada dua dekade akhir dalam millennium ini, terjadi perubahan pola wisata dari mass tourism ke individual atau small group tourism. Wisatawan berkeinginan untuk mendapat pengalaman yang lebih banyak dalam hidupnya atau menginginkan expansion of life. Proses pergeseran wisata ini telah dapat diketemukan di beberapa Negara ASEAN. Thailand,



Filipina, Malaysia dan bahkan Singapura mulai mengembangkan pola wisata dengan perjalanan yang lebih bebas dan perjalanan yang mono destination.

Pariwisata konvensional telah terbukti menghasilkan berbagai keuntungan ekonomi. Namun, bentuk pariwisata yang menghasilkan wisatawan massal telah menimbulkan berbagai masalah, utamanya menyebabkan terjadinya dampak negatif terhadap sosial budaya dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian pariwisata tidak sesuai dengan sebutan green industry dan pro poor tourism/pariwisata yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan.

Green industry sangat sesuai dengan pariwisata yang berbasis alam. Sektor kehutanan yang mengembangkan wisata alam akan mendorong tumbuhnya perusahaan yang bergerak dibidang perusahaan objek dan daya tarik wisata alam. Dalam ekosistem alami yang cukup bervariasi ini, dapat memberikan alternatif pilihan yang banyak.

Pengembangan kepariwisataan alam agak berbeda dengan kepariwisataan lainnya. Kepariwisataan alam objek dan atraksi yang dijual bertumpu pada alam. Sehingga pengembangan kepariwisataan alam memperhatikan aspek antara lain yang pertama adalah in-situ, objek daya tarik wisata alam hanya dapat dinikmati oleh wisatawan di tempatnya. Proses alam, kekayaan keunikan dan perilaku flora dan fauna, gejala geologis hanya bisa dinikmati sepenuhnya di tempat kejadiannya. Kepuasan dan pengalaman untuk menikmati, melihat dan merasakan alam di lokasinya mempunyai nilai dan tingkat kepuasan yang sempurna. Kedua adalah total experiences, bahwa kepuasan wisatawan diperoleh dari evaluasi seluruh perjalanannya dari asal tempat tinggalnya hingga kembali. Seluruh pengalaman di perjalanan, di lokasi objek dan kembali ke tempat semula merupakan total pengalaman yang harus dinikmati dan dihargai seluruhnya tanpa mengecewakan. Sehingga pengembangan wisata alam keberhasilannya sangat ditentukan oleh seluruh stakeholder yang terkait. Oleh karenanya wisata alam sebaiknya dilaksanakan secara terpadu atau dilaksanakan oleh satu holding company. Ketiga adalah perishable, bahwa atraksi alam tertentu, kejadiannya hanya terjadi pada waktu tertentu pada kala lain, atraksi ini sudah tidak dapat diulang lagi. Misalnya masa migrasi burung-burung yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Apabila waktunya tidak tepat,



atraksi alam tidak dapat dinikmati. Keempat adalah non-recoverable, bahwa suatu ekosistem alam, apabila terjadi kerusakan pemulihannya akan memakan waktu yang lama. Apabila terjadi pemulihan atau recovery secara alami, tidak mungkin sama dengan bentuk ekosistem sebelumnya.

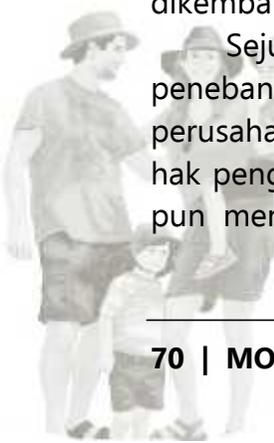
Oleh karena itu pengembangan wisata alam harus senantiasa memperhatikan daya dukung atau daya tampungnya. Demikian pula mengenal seluruh sifat dan perilaku sistemnya. Upaya yang biasa dilakukan dalam pengembangan suatu kawasan alam untuk wisata harus dibuat zonasi, pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku wisatawan harus ketat.

4.6 Peran Ganda Hutan

Green Industry identik dengan pariwisata yang berbasis alam utamanya ekowisata. Ekowisata yang menciptakan pariwisata berkualitas, memungkinkan wisatawan dalam kelompok kecil mempertahankan kualitas objek dan daya tarik alam berupa hutan, sungai, danau, pantai serta meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat lokal. Pada sektor kehutanan, pariwisata alam apalagi ekowisata diharapkan dapat menjadi kegiatan yang penting dalam memulihkan kerusakan hutan dan mengembalikan peranan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Kawasan hutan yang dikelola dengan tujuan ganda akan tercapai bila dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata alam.

Pada dasarnya ekowisata dapat dikembangkan dalam berbagai kawasan hutan seperti hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Sebab ekowisata tidak menjual destinasi tetapi menjual ilmu pengetahuan dan filsafat lokal atau filsafat ekosistem. Hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi mempunyai peluang yang sama dalam hal pengetahuan dan filsafat ekosistem. Apabila didalam kawasan hutan terdapat pedesaan dengan komunitas asli, akan dapat dikembangkan pula wisata minat khusus atau alternative tourism.

Sejumlah kawasan hutan saat ini mengalami kerusakan karena penebangan dan pembakaran oleh oknum masyarakat maupun perusahaan. Setelah beberapa dekade hutan produksi di eksploitasi oleh hak pengusahaan hutan. Hutan yang sudah menurun kualitasnya saat ini pun mengalami illegal logging. Untuk mengurangi tekanan terhadap



hutan oleh masyarakat, maka masyarakat lokal dapat diberdayakan dalam kegiatan ekowisata atau wisata minat khusus. Oleh karena itu masyarakat terserap pada kegiatan ekowisata ini, maka kerusakan hutan lebih lanjut dapat dihindarkan. Apalagi bila dilibatkan dalam kegiatan wisata minat khusus akan banyak tenaga terserap sebab jenis wisata ini membutuhkan banyak pelayanan yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal.

Selama ini sektor pariwisata dirisaukan dengan adanya kebocoran devisa. Kebocoran devisa terjadi karena belanja wisatawan mancanegara banyak yang kembali ke luar Indonesia atau kembali ke negaranya. Kebocoran devisa ini dapat dicegah atau dikurangi dengan pengembangan ekowisata. Perjalanan berwisata ke daerah pedalaman membutuhkan waktu yang panjang. Banyak orang berpendapat bahwa perjalanan wisata untuk mengunjungi kawasan pelestarian alam atau hutan belantara, belanja wisatawan atau tourist expenditure tidak besar. Tetapi adanya perjalanan yang panjang menghasilkan in route benefit yang banyak dan dinikmati masyarakat lokal. Hal ini terjadi karena pengeluaran untuk akomodasi, transportasi, makan dan souvenir dari wisatawan langsung diterima masyarakat. Adanya in route benefit yang lebih banyak pada ekowisata, mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Bahkan secara tidak langsung pemberdayaan masyarakat semakin besar karena didorong oleh kegiatan usaha dan jasa dari ekowisata. Dengan demikian maka kebocoran devisa atau foreign exchange leakage untuk jenis ekowisata ini dapat ditekan.

Dari sisi ekonomi secara nyata kawasan hutan konservasi mampu menciptakan kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pada umumnya ekowisata membutuhkan lebih sedikit investasi untuk pembangunan prasarana, tetapi kebutuhan pelayanan yang lebih banyak dibanding pariwisata yang lain.

Pengelolaan hutan produksi yang dimulai dengan penanaman hingga penebangan dan angkutan merupakan atraksi wisata. Wisatawan mancanegara akan memperoleh suguhan atraksi alam dan buatan yang sangat berbeda dengan kegiatan semacam di negaranya. Sementara wisatawan nusantara akan lebih tertarik pada atraksi-atraksi yang sifatnya buatan.

Hutan lindung biasanya kaya akan atraksi alam. Sungai, gua, air terjun yang sangat kaya ini dapat dikembangkan untuk ekowisata atau



wisata minat khusus. Daya tarik dari kawasan hutan akan semakin besar bila di dalam pengembangannya dikaitkan dengan desa tradisional di dalam dan sekitar hutan

Pengembangan ekowisata dan wisata minat khusus dalam kawasan hutan akan dapat menjamin tetap terpeliharanya hutan di samping pendapatan yang secara ekonomi sangat penting dalam memajukan perekonomian negeri ini. Pariwisata yang berbasis alam yaitu ekowisata dan wisata minat khusus, bila dikembangkan dalam hutan akan memperpanjang length of stay wisatawan dan memperkecil kebocoran devisa dari wisatawan mancanegara. Pengembangan ekowisata akan menyerap tenaga kerja yang sangat besar dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah. Suatu hal yang penting dari aspek kelembagaan yang mengelola kawasan untuk wisata alam perlu dikembangkan. Pengembangan tidak hanya terhadap institusinya tetapi juga profesionalitas dari sumber daya manusianya. Penyerapan tenaga kerja untuk pengelolaan kawasan hutan dan kawasan lindung untuk wisata alam akan sangat banyak. Ini berarti problema ketenagakerjaan dapat diselesaikan oleh sektor kehutanan.

Dari aspek konservasi fauna dan flora serta lingkungan pengembangan ekowisata ini sangat menguntungkan. Untuk ini diperlukan kebijakan baru sebagai wujud adanya paradigma baru yaitu pengembangan wisata alam yang lebih terprogram dalam kehutanan. Sebab ekowisata secara simultan dapat melestarikan ekosistem hutan, flora dan fauna, disamping mengembangkan sosial budaya masyarakat lokal dan menguntungkan dari aspek ekonomi.



BAB. V

Ekosistem Hutan

Sebagai Penyokong Pariwisata Alam

5.1 Urgensi Pengelolaan Hutan Penyokong

Kesejahteraan manusia dan kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada perbaikan cara mengelola ekosistem untuk memastikan tercapainya konservasi ekosistem dan pemanfaatan yang lestari. Pada saat kebutuhan terhadap jasa ekosistem seperti pangan dan air bersih meningkat, pada waktu yang bersamaan kegiatan manusia telah menyebabkan menurunnya kemampuan berbagai ekosistem untuk memenuhi kebutuhan ini.

Intervensi kebijakan dan pengelolaan seringkali dapat memulihkan ekosistem yang terdegradasi, sehingga meningkatkan peran ekosistem tersebut untuk kesejahteraan manusia. Namun demikian, menentukan kapan melakukan intervensi dan bagaimana bentuk intervensi ini membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang pengetahuan ekologi dan sistem sosial yang terkait. Informasi yang lebih baik memang belum bisa menjamin akan diperoleh keputusan yang lebih baik, namun hal ini merupakan kebutuhan mendasar untuk pengambilan keputusan yang baik.

Kombinasi dari permintaan terhadap jasa ekosistem yang senantiasa tinggi dan degradasi ekosistem yang bertambah parah ini telah memperkecil peluang untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Kesejahteraan manusia dipengaruhi tidak hanya oleh kesenjangan antara ketersediaan dan permintaan jasa ekosistem, namun juga oleh bertambahnya kerentanan individu, masyarakat dan negara. Ekosistem yang produktif beserta segala jasanya dapat menyediakan sumberdaya untuk manusia dan pilihan-pilihanyang ada dapat dimanfaatkan untuk melawan bencana alam atau pergolakan sosial yang mungkin terjadi. Ekosistem yang tertata dengan baik akan mengurangi risiko dan kerentanan, sementara ekosistem yang tidak dikelola dengan baik akan membahayakan manusia karena mempertinggi risiko terjadinya banjir, kekeringan, kegagalan panen pertanian atau penyakit.



Perubahan pada ekosistem ini berpengaruh tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada spesies-spesies yang lain. Tujuan pengelolaan untuk ekosistem tertentu dan langkah-langkah yang diambil dipengaruhi tidak hanya oleh dampak perubahan ekosistem ini terhadap manusia, namun juga oleh pertimbangan nilai intrinsik dari spesies dan ekosistem yang dimaksud. Nilai intrinsik adalah nilai hakekat dari suatu spesies atau ekosistem untuk masyarakat tertentu, terlepas dari nilai pemanfaatannya untuk pihak lain.

Sebagai contoh, penduduk perdesaan di India melindungi "suaka spiritual" pada kondisi yang masih sangat asli, meskipun dari perhitungan ekonomi suaka tersebut kemungkinan besar lebih menguntungkan jika diubah menjadi kawasan pertanian. Beberapa negara telah memiliki undang-undang untuk melindungi spesies terancam punah berdasarkan pemikiran bahwa spesies tersebut memiliki hak untuk hidup, meskipun upaya perlindungan spesies terancam punah itu memerlukan biaya yang tinggi. Dengan demikian, maka pengelolaan ekosistem yang baik akan mempertimbangkan pemanfaatan ekosistem oleh masyarakat setempat serta nilai intrinsik dari ekosistem tersebut sebelum merancang sebuah kebijakan dan perencanaan pengelolaan suatu ekosistem.

5.2 Skenario Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem

Hutan dengan segala isi dan prosesnya merupakan sebuah ekosistem, yang merupakan suatu komunitas tumbuhan, hewan dan mikroorganisme beserta lingkungan non-hayati yang dinamis dan kompleks, serta saling berinteraksi sebagai suatu unit yang fungsional. Perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan yang berdasarkan ekosistem dapat diartikan sebagai sebuah cara yang berhubungan dan pemanfaatan ekosistem, yang terdiri dari melindungi, memelihara, dan bila perlu memperbaharui keragaman hayati dari level spesies dan genetik menuju level komunitas dan lanskap. Perpekstif ekosistem bekerja pada semua skala dari mikro sampai global. Sebuah pendekatan berbasis ekosistem dalam pemanfaatan hutan adalah melindungi/ menjaga fungsi hutan pada semua skala spasial dan waktu sebagai prioritas pertama, selanjutnya menuju pemanfaatan yang berkelanjutan atau lestari dalam batasan ekologi. Hal itu berarti, bahwa pendekatan berbasis ekosistem memfokuskan seluruh kegiatan pengelolaan pada

apa yang dapat dibiarkan di alam, baru kemudian apa yang dapat diambil tanpa merusak fungsi ekosistem keseluruhan.

Pada sebuah ekosistem hutan, komposisi hutan, struktur dan fungsi harus selalu dijaga mulai dari lanskap terbesar sampai komunitas hutan terkecil, baik pada jangka pendek sampai jangka panjang. Dengan kata lain, sebuah ekosistem hutan tidak statis dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Proses alami yang terjadi, secara terus menerus akan merubah ekosistem hutan dari waktu ke waktu, begitu juga gangguan yang tidak diinginkan, mulai dari pengelolaan hutan terpadu ataupun bentuk-bentuk lain dari pengelolaan hutan konvensional.

Sebuah ekosistem hutan juga sebuah ruang spasial yang berkelanjutan, di mana setiap bagian hutan saling berhubungan, kluster-kluster ekosistem saling tergantung satu sama lain, mulai dari bagian kecil dari jenis tanah yang berbeda pada luasan 4 ha tegakan hutan sampai sebuah DAS seluas 500.000 ha atau lebih. Artinya bahwa dalam pengelolaan yang berbasis ekosistem bertujuan untuk mencapai sebuah kelestarian hutan pada dimensi waktu dan ruang, sehingga selalu didasari oleh pemahaman bahwa apa yang kita perbuat pada sebuah bagian hutan, maka akan menyebabkan perubahan pada seluruh kawasan hutan.

Pada sebuah pengelolaan hutan berbasis ekosistem selalu berusaha untuk menghindari hilangnya fungsi hutan dengan cara memelihara komposisi dan struktur hutan, mulai dari bakteri tanah yang paling kecil sampai suatu bagian hutan dari suatu areal besar DAS. Kita mungkin tidak harus lebih dahulu memahami fungsi dari suatu komposisi dan struktur dari suatu bagian hutan, untuk memutuskan perlindungan terhadap komposisi dan struktur hutan tersebut. Karena suatu pendekatan berbasis ekosistem mengharuskan modifikasi yang minimum terhadap komposisi dan struktur ekosistem hutan, untuk menghasilkan berbagai fungsi hutan yang optimal (multi fungsi). Sebagai contoh, dengan memelihara sebuah pohon pada suatu areal HPH atau meninggalkan tegakan pohon-pohon tua pada setiap bagian hutan, kita akan menghasilkan sebuah lingkungan dengan rentang manfaat yang lebar, mulai dari ekowisata sampai penebangan kayu. Hal tersebut tidak akan didapatkan pada sistem penebangan konvensional, seperti pada tebang habis dan hutan tanaman.



Sebagai acuan yang dapat digunakan oleh perencana maupun pengelola hutan, Silva Forest Foundation (1997) telah merekomendasikan 10 prinsip kebijakan pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem, yaitu :

Prinsip 1: Memfokuskan pada apa yang akan ditinggalkan, bukan apa yang akan diambil.

Sebuah pendekatan berbasis ekosistem dalam pemanfaatan hutan membiarkan secara penuh fungsi hutan pada seluruh skala spasial sepanjang waktu. Sebagai contoh, seorang pengelola HPH harus mengidentifikasi setiap bagian hutan dalam areal hutan konsesinya, areal-areal mana yang harus dilindungi, serta mengidentifikasi fungsi hutan yang harus dijaga, pada jangka pendek dan jangka panjang.

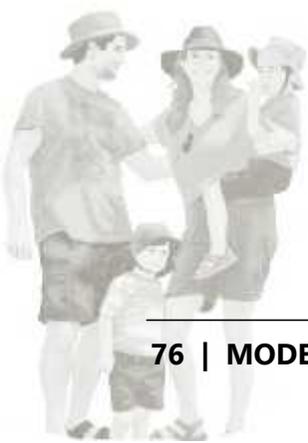
Prinsip 2: Terapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh perencanaan dan kegiatan pengelolaan hutan.

Prinsip kehati-hatian berarti dalam setiap perencanaan pengelolaan harus selalu mementingkan aspek perlindungan fungsi ekosistem hutan daripada aspek produksi jangka pendek (jatah tebangan tahunan). Dengan kata lain, jika kita tidak yakin bahwa kegiatan yang akan dilakukan akan melindungi, menjaga dan memperbaiki fungsi ekosistem, jangan dilakukan.

Prinsip 3: Seluruh perencanaan dan kegiatan harus memasukkan perlindungan fungsi hutan pada semua skala waktu dan

ruang, dengan menentukan batas ekologis dari seluruh jenis ekosistem hutan.

Skala waktu yang harus dipertimbangkan adalah perencanaan pengelolaan hutan pada periode 500 tahun atau lebih, terhadap rencana penebangan selama 1 sampai 20 tahun. Sedangkan skala ruang dalam satu perencanaan ditentukan untuk areal hutan paling kecil, misalkan sebuah areal hutan pada sebuah Sub DAS kecil seluas 200 ha atau lebih. Yang dimaksud dengan batas ekologis adalah faktor biofisik yang membatasi berbagai pemanfaatan hutan yang menyebabkan tingkat perubahan ekosistem yang tidak dapat diterima. Sebagai contoh, batas ekologis yang



biasanya digunakan adalah: tanah dangkal (kurang dari 30 cm), daerah yang sangat kering atau sangat basah, daerah sangat curam (lebih dari 45%), daerah sempadan sungai, dan sebagainya.

Prinsip 4: Seluruh perencanaan dan kegiatan harus melindungi, memelihara dan jika perlu merehabilitasi keanekaragaman hayati yang ada (genetik, spesies dan komunitas).

Pemeliharaan dan rehabilitasi keanekaragaman hayati sangat penting dilakukan untuk melestarikan seluruh kehidupan yang kita ketahui pada suatu ekosistem hutan. Pemeliharaan keragaman genetik artinya menjamin keberadaan genetik lokal termasuk genetik pohon yang ditebang pada suatu areal, harus segera direhabilitasi dengan genetik yang sama jika sudah sangat rusak. Pemeliharaan keragaman spesies dan komunitas berarti pemeliharaan keragaman populasi lokal meliputi tumbuhan, satwa dan mikroorganisme, pada setiap fase suksesi pada seluruh tipe ekosistem yang ada di seluruh kawasan hutan. Perlindungan keragaman hayati tidak boleh bersifat kaku dan eksklusif, tapi tetap memperhitungkan budaya dan ekonomi masyarakat.

Prinsip 5: Menghargai dan memelihara proses/ gangguan alam sepanjang waktu dan ruang sebagai dasar kegiatan perlindungan, pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan hutan.

Sebagai contoh, adanya pohon yang rusak karena kebakaran hutan atau gangguan alam lainnya, sangat memengaruhi komposisi, struktur dan fungsi ekosistem dari keseluruhan fungsi hutan. Pada level bentang lahan, gangguan alam baik besar maupun kecil sangat berpengaruh terhadap keragaman pola habitat dan keragaman tumbuhan dan hewan. Perlindungan dan pemeliharaan sangat diperlukan untuk keperluan pembentukan komposisi, struktur dan fungsi hutan pada suatu bentang lahan.

Prinsip 6: Pada setiap aktivitas perencanaan dan pengelolaan hutan harus selalu memperhatikan aspek perlindungan,



pemeliharaan, dan pemulihan komposisi, struktur, dan fungsi hutan pada setiap bagian atau level tegakan. Komposisi diarahkan sebagai bagian dari penyehatan ekosistem hutan secara alami meliputi topografi, tanah, air, tumbuhan, hewan dan mikroorganisme. Struktur merupakan susunan dari berbagai bagian di dalam suatu ekosistem hutan meliputi sejumlah pohon besar, pohon-pohon intermediat, tumbuhan bawah, serta pohon yang sudah tumbang. Fungsi hutan lebih ditujukan pada bagaimana seluruh fungsi hutan berlangsung optimal pada jangka waktu yang lama.

Prinsip 7: Pada setiap aktivitas perencanaan dan pengelolaan hutan harus selalu memperhatikan aspek perlindungan, pemeliharaan, dan pemulihan ekosistem hutan pada keseluruhan skala ekologis.

Hubungan antara lingkungan dan komponen ekosistem hutan perlu dipelihara, misalnya dengan memastikan perlindungan pola tata air (hidrologi hutan), meliputi siklus air tanah dan sempadan sungai pada suatu sistem sungai atau sistem lahan basan yang kompleks. Akses hubungan ini juga harus dipelihara dalam ekosistem hutan dengan melindungi, dan memulihkan kembali secara penuh komposisi dan struktur hutan mulai dari skala bentang lahan yang besar sampai yang terkecil.

Prinsip 8: Pengakuan terhadap konsep lanskap hutan yang meliputi seluruh organisme hutan dan prosesnya.

Suatu lanskap hutan yang disebabkan oleh suatu pohon yang tumbang akan berbeda dengan lanskap yang dihasilkan dari suatu proses kebakaran hutan. Lanskap hutan dapat bertahan pada beragam skala, tergantung pada organisme atau prosesnya pada hutan tersebut. Dengan mengetahui seluruh organisme hutan dan proses yang terjadi tersebut dapat dipastikan pemeliharaan atau pemulihan kembali seluruh fungsi hutan.

Prinsip 9: Keseimbangan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan, untuk mendorong



keberlangsungan fungsi hutan secara secara ekologi, sosial dan ekonomi yang tetap berlangsung optimal.

Dalam menyusun perencanaan pada suatu tegakan hutan, kita dapat menggunakan model alami yang terdapat pada komposisi hutan, struktur dan fungsinya dari bagian hutan terkecil hingga lanskap hutan terbesar. Gangguan alam, seperti kebakaran hutan dan hama tanaman, yang secara dramatis mengubah suatu hutan merupakan proses pemeliharaan dan pemulihan kembali secara alamiah sehingga ada proses pemulihan kondisi hutan. Hutan alam sangat tergantung pada keragaman ekologis, sehingga seluruh jenis pemanfaatannya harus bertujuan untuk menyeimbangkan, mempertahankan, serta melindungi keragaman ekologis tersebut, baik bagi manusia atau lingkungannya.

Prinsip 10: Selalu melakukan evaluasi keberhasilan seluruh kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip ekologi.

Pertanyaan mendasar yang diajukan selama evaluasi meliputi:

- a. Apakah pola alamiah lanskap hutan terpelihara atau telah terpulihkan kembali?
- b. Apakah tegakan alam dan bagian komposisi dan struktur hutan telah dipelihara atau dipulihkan kembali?
- c. Apakah kualitas air, kuantitas dan waktu aliran pada keseluruhan skala tetap?
- d. Apakah struktur hara dan proses struktur hara tetap?
- e. Sudahkah areal hutan yang mengalami gangguan alam dilindungi atau dipulihkan kembali?
- f. Apakah seluruh pengguna proses hutan secara ekologi, antara manusia dan bukan manusia, telah berlaku adil dan melindungi keseluruhan kawasan hutan?

5.3 Pengelolaan Hutan Kita: Sudahkah Berbasis Ekosistem?

Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia terikat oleh berbagai kesepakatan internasional, antara lain adalah Convention on Biodiversity, Convention on Climate Change, Forest Principles dan World Conservation Strategy. Dengan ratifikasi konvensi ini seluruh kebijakan



pengelolaan hutan harus mempertimbangkan rambu-rambu yang telah disepakati dalam konvensi ini. Berbagai kesepakatan internasional seperti Forest Principles (KTT Bumi), konferensi ITTO, kelembagaan ecolabel telah mengarahkan ke bentuk pengelolaan hutan di Indonesia yang bersifat sustainable forest management, yang bercirikan keterlanjutan fungsi ekologis/lindung fisik hutan (tanah, flora, fauna, hidrologi dan iklim), keberlanjutan fungsi produksi dan keberlanjutan fungsi sosial budaya. Dengan kata lain pengelolaan hutan yang tetap berorientasi sebagai ekosistem dengan fungsi ekologis, produksi dan sosial telah merupakan kesepakatan internasional.

Prinsip-prinsip tersebut sudah sejalan dengan tujuan pengelolaan hutan Indonesia, di mana dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999, bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan external, dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan pengelolaan hutan seperti yang dimaksud dalam UU No. 41 tahun 1999 tersebut mengisyaratkan bahwa produk hutan sudah semestinya bukan didasarkan atas kayu saja, melainkan produk seluruh potensi ekosistem hutan sesuai kemampuan optimal ekosistem yang bersangkutan secara lestari. Harusnya sudah mulai dipikirkan bahwa dalam penentuan jatah tebangan (AAC atau JPT) dihitung bukan berdasarkan pada produksi dan konsumsi kayu (baik legal maupun illegal cutting), akan tetapi lebih pada kemampuan ekosistem hutan dan atau kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.



Contoh lainnya, Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa, telah menetapkan visi dan misi pengelolaan hutan yang bernuansa pendekatan ekosistem. Visi tersebut adalah Pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian salah satu dari keempat misinya adalah mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat. Sosialisasi konsep ini telah dilakukan dengan berbagai workshop untuk seluruh unit-unitnya. Hanya sayang, peraturan penjabarannya dan kajian-kajian untuk menyempurnakan sistem pengaturan kelestarian hutan yang selama ini hanya didasarkan oleh "produksi kayu", belum banyak dilakukan, apalagi penerapannya di lapangan.

Sebuah kebijakan atau perubahan sistem pengelolaan hutan dengan pendekatan ekosistem, perlu bersifat adaptif dan fleksibel agar mendapatkan manfaat dari pengalaman masa lalu, berhati-hati dengan risiko, serta mempertimbangkan ketidakpastian. Pemahaman dari dinamika ekosistem hutan ini akan selalu terbatas, sementara sistem sosial-ekonomi akan terus berubah, dan faktor dari luar tidak pernah dapat diantisipasi secara penuh. Para penentu kebijakan pengelolaan hutan harus mempertimbangkan apakah ekosistem hutan akan dapat pulih kembali dan sedapat mungkin untuk melakukan evaluasi dan monitoring hasil akhir dari tindakan yang telah diambil. Proses menuju kesepahaman untuk memutuskan bagaimana persisnya melakukan hal ini dan diskusi mengenai pengelolaan yang adaptif, pembelajaran sosial, standard minimum yang aman, dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) akan berlangsung terus. Semua pendekatan ini memberikan satu pesan yang sama: menyadari keterbatasan dari kemampuan manusia, memberikan perhatian khusus terhadap perubahan yang bersifat tidak pulih kembali (irreversible), dan mengevaluasi dampak yang dihasilkan dari suatu keputusan.

Untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan dengan menggunakan pendekatan ekosistem tersebut, diperlukan pengetahuan dan pemikiran yang mendalam mengenai aspek ekonomi, sosial dan



ekologi untuk mencapai pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Banyaknya permasalahan kehutanan yang terjadi selama ini, baik pada level kebijakan, maupun operasional pengelolaan hutan di lapangan, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pendekatan ekosistem masih belum diterapkan dengan benar dalam pengelolaan hutan kita. Ke depan, diharapkan kita dapat memperbaiki sistem pengelolaan hutan kita dengan pendekatan ekosistem, yang dimulai dengan menerapkan prinsip-prinsip ekosistem dalam setiap perencanaan dan kebijakan yang akan ditetapkan.



BAB VI

Perlindungan Hutan Berbasis Ekosistem

6.1 Perlindungan Untuk Kelestarian

Perlindungan hutan merupakan suatu upaya untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan hutan dari berbagai gangguan yang dapat mengganggu dan merusak sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti flora dan fauna, biota laut, ekosistem, habitat, tata air dan lain-lain. Perlindungan hutan hanya mungkin dilaksanakan jika direncanakan dengan baik dan benar dengan mengakomodir dan merefleksikan potensi atau daya dukung dari sumberdaya hutan yang menjadi objek perlindungan.

Dengan pemahaman bahwa sumberdaya hutan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari suatu ekosistem bentang alam, maka potensi ataupun daya dukung dari sumberdaya hutan tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dalam konteks keterkaitannya dengan ekosistem lain yang dapat dipengaruhi dan atau dapat memengaruhinya. Perlindungan hutan harus memperhatikan bentuk-bentuk keterkaitan termaksud, dan karena itu pula perlindungan hutan harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan ekosistem bentang alam.

Sehubungan dengan itu pula, perlindungan hutan sejatinya dilandasi dengan pemahaman atau pengetahuan tentang kondisi ekosistem bentang alam di mana hutan yang menjadi objek perlindungan hutan. Pemahaman atau pengetahuan termaksud harus didasarkan pada hasil penelurusan secara menyeluruh dan hasil analisis yang seksama terhadap komponen-komponen ekosistem hutan. Perpaduan antara pengetahuan tentang potensi hutan dengan prinsip-prinsip perlindungan hutan yang sekaligus menjadi prinsip-prinsip perencanaan hutan, akan memungkinkan terlaksananya perlindungan hutan berbasis ekosistem.



6.2 Implementasi Perlindungan Hutan Berbasis Ekosistem

Pendekatan Perlindungan Hutan Berbasis Ekosistem (PBE) berarti melindungi semua fungsi hutan pada semua skala sepanjang waktu sebagai prioritas pertama dan kemudian berupaya melestarikan diversitas nilai manfaat dalam batas-batas kapasitas ekologi. Dengan kata lain PBE memusatkan perhatian pertama kali pada “apa yang ditinggalkan” dan kemudian baru “apa yang dimanfaatkan” tanpa harus menimbulkan kerusakan ekosistem. Ketika pemanenan kayu ditentukan sebagai aktivitas yang dipilih, pengelolaan yang bertanggung jawab secara ekologi berarti rencana dan aktivitas dikembangkan dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga melindungi (protect), menjaga (maintain) dan memperbaiki (restore) fungsi penuh ekosistem. Penjagaan fungsi penuh itu dilakukan terhadap struktur, komposisi mulai dari skala lansekap sampai skala komunitas yang paling kecil baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Perlindungan hutan berbasis ekosistem merupakan implementasi dari pengelolaan ekosistem. Pengertian pengelolaan ekosistem dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan yang dilakukan dalam suatu kesatuan bentang alam yang dibatasi oleh batas-batas ekologis, bukan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan atau politik. Kesatuan bentang alam yang dimaksud adalah kesatuan ekosistem, antara lain seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), tipe hutan atau formasi hutan dalam suatu kesatuan wilayah yang kompak.
2. Pengelolaan yang berlandaskan pada interaksi (hubungan ketergantungan) di antara komponen-komponen pembentuk ekosistem (hayati dan non hayati) dengan komponen-komponen lingkungannya (hayati dan non hayati).
3. Pengelolaan yang memperhatikan keseluruhan fungsi ekosistem, mencakup fungsi-fungsi ekologis, ekonomi dan sosial
4. Pengelolaan yang mencakup tindakan-tindakan pemulihan, pembinaan, pelestarian kualitas (kesehatan) ekosistem, serta pemanfaatannya untuk kepentingan ekonomi dan sosial secara lestari.



Pengelolaan ekosistem menekankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor ekologi dan manusia merupakan unsur dasar dalam pengelolaan ekosistem. Manusia merupakan bagian penting dari ekosistem
2. Melestarikan kualitas (kesehatan) ekosistem merupakan prioritas utama, sedang menyediakan keperluan manusia dari beranekaragam manfaat serta pilihan-pilihan nilai ekosistem yang mereka harapkan merupakan prioritas kedua, dan bukan sebaliknya
3. Pengelolaan ekosistem merupakan tipe pengelolaan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan karena itu sangat diperlukan adanya monitoring terhadap kontribusi setiap ilmu yang relevan
4. Pengelolaan ekosistem memerlukan pendekatan yang bersifat spesifik lokasi melalui proses yang bersifat dinamis (adaptif), yang menuntut adanya pemahaman yang mendalam tentang interaksi dan proses ekologis yang diperlukan untuk melestarikan komposisi, struktur, dan fungsi ekosistem

Hal-hal yang tersebut di atas merupakan falsafah dasar dalam konsep Pengelolaan Ekosistem. Dalam kenyataan atau dalam praktik, kita tidak mungkin mengelola seluruh komponen, interaksi dan proses dalam suatu ekosistem. Hal yang mungkin kita lakukan adalah memanipulasi aspek-aspek tertentu dari ekosistem dan tetap mempertahankan atau melestarikan sifat-sifat tertentu yang diperlukan, serta memperhitungkan kesemuanya sebagai hal-hal yang akan memengaruhi masukan, proses, interaksi dan keluaran ekosistem (Malamassam, 2009).

6.3 Prinsip-Prinsip Implementasi Perlindungan Hutan

Prinsip dasar perlindungan hutan yang paling penting bagi semua penyebab kerusakan adalah pencegahan awal terjadinya atau perkembangan penyebab kerusakan akan lebih efektif dibanding dengan pengendalian setelah kerusakan terjadi. Pencegahan awal diartikan sebagai pengambilan langkah yang jelas untuk menghambat perkembangan penyebab kerusakan jangan sampai melampaui tingkat yang menimbulkan kerugian yang besar. Upaya pencegahan penyebab kerusakan dilakukan melalui tindakan pengelolaan dan silvikultur yang



tepat dan hati-hati sehingga hutan dapat berkembang membentuk suatu keseimbangan ekologis.

Di dalam PBE, manusia dimasukkan sebagai bagian yang saling berkaitan dan bergantung sehingga dipahami bahwa manusia modern saat ini mempunyai kekuatan besar untuk mengubah dan merusak ekosistem hutan dibanding jasad hidup lain. Oleh karenanya, perhatian diarahkan pada upaya agar penggunaan teknologi tidak menimbulkan degradasi hutan. Hal ini berarti, PBE lebih memusatkan perhatiannya bagaimana mengelola aktivitas manusia di dalam ekosistem hutan dibandingkan memanipulasi ekosistem untuk memenuhi keinginan manusia semata.

Dalam implementasi PBE, dikenal 10 prinsip PBE untuk melindungi dan memanfaatkan hutan, yaitu:

1. Menitik beratkan pada apa yang ditinggalkan dan tidak pada apa yang diambil.
2. Menerapkan prinsip pencegahan kerusakan dalam semua rencana dan aktivitas.
3. Semua rencana dan aktivitas diarahkan untuk melindungi hutan agar tetap berfungsi pada semua level, waktu dan ruang.
4. Semua rencana dan aktivitas ditujukan untuk melindungi, menjaga dan bila perlu memperbaiki diversitas biologi dalam ekosistem hutan.
5. Menghargai dan menjaga kerusakan alami dalam hutan.
6. Melindungi, menjaga dan memperbaiki struktur, komposisi dan fungsi komunitas pada semua level.
7. Melindungi, menjaga, memperbaiki saling keterkaitan ekosistem pada semua level.
8. Memahami bahwa konsep lansekap sangat tergantung pada semua jasad dan proses-proses didalamnya.
9. Rencanakan aktivitas yang seimbang dalam aspek-aspek ekologi, sosial dan ekonomi.
10. Evaluasi keberhasilan semua aktivitas berdasarkan ukuran persyaratan ekologi.



6.4 Implementasi Perencanaan Hutan Yang Mendukung Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem

Dalam uraian di muka telah dibahas prinsip-prinsip yang seyogyanya dipegang dalam manajemen perlindungan hutan yang sejalan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam merumuskan perencanaan perlindungan hutan yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan seyogyanya berlandaskan kepada syarat-syarat perencanaan hutan yang dapat menunjang pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Ciri-ciri perencanaan hutan berbasis ekosistem hutan adalah:

1. Menjadikan kesatuan bentang alam ekologis sebagai kesatuan analisis dalam penetapan kebutuhan luas kawasan hutan

Secara umum hutan berfungsi untuk memproduksi hasil hutan, mengawetkan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya, serta melindungi sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pada dasarnya setiap kesatuan ekosistem hutan harus dapat memberikan seluruh fungsi-fungsi tersebut. Besar kecilnya peran setiap kesatuan ekosistem hutan dalam memberikan setiap macam fungsi akan sangat bergantung pada karakteristik biofisik hutan dan tindakan pengelolaan yang diberikan.

Pada kenyataannya penetapan tindakan pengelolaan yang dapat memaksimalkan seluruh macam fungsi hutan dalam setiap kesatuan ekosistem hutan adalah suatu hal yang sangat sulit. Hal yang paling mungkin dan umum dilakukan adalah penetapan fungsi utama (fungsi pokok) yang diharapkan dapat diberikan oleh setiap kesatuan ekosistem hutan. Di Indonesia (menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) telah ditetapkan tiga macam fungsi utama dari setiap kesatuan hamparan lahan hutan yaitu: Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

2. Memadukan kepentingan-kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial.

Memadukan kepentingan-kepentingan setiap macam fungsi pengelolaan hutan sebagai berikut:



a. Kepentingan ekologi

Dipertimbangkan dalam penetapan keperluan hutan lindung dalam setiap DAS dan penetapan keperluan hutan konservasi dalam setiap kesatuan wilayah ekologis (ecorogion).

b. Kepentingan ekonomi

Penetapan hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Keperluan hutan produksi harus didasarkan kepada pertimbangan keperluan penyediaan hasil hutan untuk berbagai keperluannya untuk memenuhi bahan baku industri untuk keperluan ekspor, konsumsi dalam negeri dan keperluan masyarakat sekitar hutan. Oleh karenanya maka penetapan hutan produksi seyogyanya dilakukan dalam setiap kesatuan pengembangan industri kehutanan dan kesatuan masyarakat yang kehidupannya tergantung kepada hutan.

c. Kepentingan sosial

Dilihat dari kepentingan sosial, diperlukan adanya hutan yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan umum berupa kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya. Kawasan hutan yang berfungsi untuk ini adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus. Oleh karenanya maka penetapan keperluan kawasan hutan dengan tujuan khusus seyogyanya ditetapkan pada setiap kesatuan wilayah masyarakat hukum adat dan wilayah-wilayah tertentu yang menjadi pusat penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan dalam bidang kehutanan.

Setelah kepentingan masing-masing fungsi terpenuhi, selanjutnya ditetapkan preskripsi perlindungan hutan pada tingkat tapak. Preskripsi perlindungan hutan pada tingkat tapak merupakan deskripsi mengenai tujuan, macam dan volume kegiatan, tata waktu dan tata letak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan hutan, serta proyeksi hasil yang diharapkan. Agar keseimbangan fungsi-fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial hutan dapat dicapai, maka semua pihak yang berkepentingan seperti, pengelola,



pemerintah, pelaku usaha yang terkait, ilmuwan dan berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penetapan preskripsi perlindungan hutan. Untuk keperluan ini, maka pelaksanaan perencanaan yang harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah seperti diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

3. Berperspektif jangka panjang dan berkelanjutan.

Perencanaan perlindungan hutan yang menunjang pengelolaan hutan berbasis ekosistem harus mendasarkan kegiatannya pada pemikiran atau anggapan dasar yang memiliki perspektif jangka panjang dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan adanya kemantapan dalam hal kawasan hutan, keberadaan hutan dan fungsi ekosistem hutan.

a. Kemantapan kawasan hutan

Kawasan hutan merupakan wilayah yang diperuntukkan sebagai hutan, terdiri dari lahan yang berhutan dan lahan yang tidak berhutan yang akan dibangun dan dipertahankan sebagai hutan. Kawasan hutan ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Keberadaan hutan tetap merupakan suatu keharusan untuk menjamin pengelolaan hutan berkelanjutan.

b. Kemantapan keberadaan hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan hutan berkelanjutan mempersyaratkan keberadaan hutan dengan luasan tertentu pada setiap satuan waktu tertentu. Untuk hutan produksi areal berhutan boleh dirubah keadaannya, melalui tindakan penjarangan atau penebangan yang sesuai dengan rencana yang benar. Setiap areal bekas penebangan tersebut harus ditanami kembali dan dibina sehingga pada akhir daur akan pulih kembali dan memiliki potensi minimal sama dengan potensi sebelum ditebang. Untuk hutan lindung dan hutan konservasi, sejatinya tetap berpenutupan hutan sepanjang waktu.



c. Kemantapan fungsi ekosistem hutan

Pengelolaan hutan berkelanjutan mempersyaratkan tidak berkurangnya peran fungsi ekosistem dalam mendukung sistem kehidupan pada setiap kesatuan bentang alam, dari satu generasi ke generasi penerusnya. Hal ini mengandung arti bahwa fungsi ekosistem hutan tersebut haruslah tetap setiap saat. Berhubung karena luas hutan pada setiap saat adalah sama atau bahkan cenderung berkurang, sedang total kebutuhan terhadap barang dan jasa dari ekosistem hutan untuk menyangga sistem kehidupan selalu meningkat, maka kualitas dan produktivitas ekosistem hutan setiap saat seharusnya tidak berkurang atau jika dapat lebih meningkat.

4. Memadukan ilmu pengetahuan yang cukup dan tepat dengan kearifan lokal melalui proses pembelajaran yang bersifat dinamis.

Setiap kesatuan ekosistem hutan memiliki karakteristik biofisik dan keadaan ekonomi serta sosial budaya masyarakat yang bersifat spesifik. Sejalan dengan itu, permasalahan yang muncul dalam setiap kesatuan ini akan bersifat kompleks dan berbeda dengan permasalahan yang muncul dalam kesatuan ekosistem di luarnya. Untuk menjawab permasalahan dalam setiap kesatuan ekosistem hutan diperlukan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang yang sesuai. Namun ilmu pengetahuan yang tersedia seringkali tidak cukup memadai untuk menjawab keseluruhan permasalahan yang dihadapi. Sehubungan dengan itu diperlukan informasi mengenai kearifan lokal masyarakat (local knowledge) yang diharapkan dapat melengkapi ilmu pengetahuan yang ada dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Jawaban yang tepat terhadap semua persoalan yang dihadapi tidak mungkin diperoleh secara pasti melalui proses yang bersifat statis. Untuk itu diperlukan suatu proses pembelajaran bersama (pengelola, pengambil keputusan dan masyarakat) yang bersifat berkelanjutan (terus menerus) dan dinamis.

5. Memperhatikan karakteristik spesifik dan kepentingan lokal.

Preskripsi pengelolaan dalam setiap kesatuan pengelolaan harus mampu menjawab permasalahan yang dihadapi dalam setiap kesatuan pengelolaannya dan memenuhi syarat-syarat pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem. Untuk keperluan ini maka perencanaan perlindungan hutan harus memperhatikan karakteristik spesifik dan



kepentingan lokal tempat ekosistem hutan berada. Kepentingan lokal ini terutama ditentukan oleh dua kelompok kepentingan, yaitu:

- a. Pemerintah daerah beserta jajarannya sampai pada tingkat desa untuk kepentingan pelaksanaan program-program pembangunan dalam wilayahnya
- b. Masyarakat, terutama masyarakat hukum adat dan masyarakat di sekitar kesatuan pengelolaan hutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka

Dengan demikian, preskripsi pengelolaan dalam setiap kesatuan pengelolaan hutan harus berlandaskan kepada:

- a. Fungsi penggunaan hutan: hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hutan dengan tujuan khusus
- b. Arah pengembanaan industri kehutanan dalam arti luas, termasuk industri pariwisata alam (ekowisata)
- c. Arah pembangunan daerah (provinsi, kabupaten / kota)
- d. Adat istiadat masyarakat dalam setiap masyarakat hukum adat



DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. (2007) Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan. FISIP UI Press. Depok.

Adler, A. (2002). Individual Psychology. Worcester Mass: Clark Univ Press.

Burkat, A.J and Medlik,S (1988) Tourism Past Present and Future. ELBS edition.London. Heineman.

Chariri, A.,&Ghazali, I. (2007). Teori Akuntansi, Semarang: Badan Penerbit. UNDIP.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2008) Kode Etik Pariwisata Dunia. Indonesia.

Fandeli (2001) Dasar-Dasar Manajemen: Kepariwisata Alam, Liberty, Yogyakarta.

Freeman, R. E., (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach, , Boston: Pitman Publishing.

Fridgen Joseph D (1991) Dimension Of Tourism. Education Institute. USA Lavery Patrick.

Gunn, C.A (1994) Tourism Planning. Taylor and Francis. Washington.

Handoko, Fransiskus. (2010) Perencanaan Pariwisata Partisipatif, Opini pada Harian Kalteng pos, Kalimantan Tengah.

Hainim.B. (2000). Manajemen Atraksi Wisata. Bandung : Sekolah Tinggi Wisata Bandung.

Ismayanti (2010). Pengantar Pariwisata, Gramedia, Jakarta.

Kementerian Pariwisata (2019) CEO Message #52 Sustainable Tourism Development. Jakarta.



- Kementerian Pariwisata (2016) Analisis Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pariwisata. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata (2016) Modul Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata (2016) Modul Pengantar Kepariwisataan Kementerian Pariwisata. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata (2016) Modul Produk Kepariwisataan Kementerian Pariwisata. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata (2016) Modul Wawasan Pembangunan Kepariwisataan Nasional Kementerian Pariwisata. Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.
- Marsongko, E.P (2001) Environmental Management System for Tourist Attractions: Curriculum & Syllabus. STP. Bandung.
- McKercher, Bob & Bauer, Thomas G (2003). Sex and Tourism: Journeys Of Romance, Love and Lust. New York: Hawort Press.
- Middleton, V (2010). Marketing In Travel and Tourism. Oxford: Butterworth – Heinemann.
- Mill, Robert Christine. (2000). Tourism The International Bussiness. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Nasikun, (2000).Sistem Sosial Indonesia.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nelson, J., Butler, R., & Wall, G. (1993). Tourism and Sustainable Development : Monitoring, Planning, Managing. Canada: Department of Geography University of Waterloo.



Yoeti, Oka A.1985. Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa, Bandung.

Ooi, Can-Seng. (2006). Tourism and the Creative Economy in Singapore.

Oka A. Yoeti (2006) Pemasaran Pariwisata, angkasa, Bandung.

Pendit, N.S. (2006) Ilmu Pariwisata, Sebuah Pengantar, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.

Pitana, I.G, Diarta Ketut Surya (2009). Pengantar Ilmu Pariwisata, Andi, Yogyakarta.

Purwanto, (2004) Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol 9: Kualitas Produk Wisata Terhadap Minat Berkunjung Kembali ke Kebun Binatang Surabaya.

Sammeng, Andi Mappi. (2001). Cakrawala Pariwisata. Jakarta : Balai Pustaka.

Soekadijo, R. G. (1997). Anatomi Pariwisata. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Suswantoro. (2007). Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Swarbrooke. (1998) Sustainable Tourism Management: Principles and Practice. New York.

Taliziduhu Ndraha, 1990, "Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas". Rieneka Cipta. Jakarta.



The Travel & Tourism Competitiveness Report(2019). Travel and Tourism at a Tipping Point.

The Travel & Tourism Competitiveness Report (2017) Paving the way for a more sustainable and inclusive future.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

Wall, Geoffrey (1993). Towards a Tourism Typology. Dalam JG. Nelson, R. Butler and Managing. Waterloo Dept Of Geography University Waterloo.

Wibisono, Yusuf.(2007) Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing.

Yahya, Arief. (2019) Arief Yahya dalam Roundtable Discussion bertema Sustainable Tourism yang digelar KORAN SINDO dan SINDOnews di Jakarta.

<http://pengamananhutan.blogspot.com/2012/05/perlindungan-hutan-berbasis-ekosistem.html> tanggal 2 Agustus 2020.

<https://forestscene.wordpress.com/2006/06/22/pengelolaan-hutan-berbasis-ekosistem/>tanggal 2 Agustus 2020.



TENTANG PENULIS

PENULIS 1



Fransiskus Handoko, SST.Par., M.Sc lahir di Dumai, Provinsi Riau, tanggal 22 Agustus 1980 dari orang tua Ayah E.W.B Wenno dan Ibu Cecilia Sriwidayati. Anak ke-2 dari 4 bersaudara. Menempuh pendidikan SD 1 YKPP tamat Tahun 1993 di Dumai, SMPK Santo Tarcisius Dumai tamat Tahun 1996 di Dumai, SMAN 2 Tahun 1999 di Pekanbaru, meraih Gelar Sarjana Sains Terapan Pariwisata DIV (SST.Par) di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung tamat pada tahun 2004, kemudian menyelesaikan studi Magister Kajian Pariwisata S2 (M.Sc) tamat tahun 2008 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau menikahi wanita anggun dan cantik bernama Mardiana Pardosi, SH dan dianugrahi sepasang anak yang luar biasa bernama Priscilia Viola dan Thomas Dion.

Pernah mengikuti pelatihan Training Of Trainer (ToT) di beberapa Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan Manajemen Pariwisata dan Aparatur. Beberapa waktu yang lalu berkesempatan mengikuti magang kerja berkaitan Hospitality Industry di kota Honderloo, Belanda Tahun 2005- 2006, sempat bekerja di Industri Perhotelan tahun 2008-2009 sebagai marketing eksekutif di kota Bogor Jawa Barat, kemudian Ia hijrah ke Palangka Raya, dan meniti karir sebagai PNS dengan jabatan Widyaiswara yang mengajar dan memberi pelatihan pariwisata pada Aparatur di Dinas Pariwisata dan CPNS/PNS di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 - 2015. Pada tahun 2016 akhir beliau hijrah ke Pusat Pengembangan SDM Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta. Di sela- sela kesibukannya, Ia juga menjadi dosen tamu di Akademi Pariwisata Paramitha Jakarta sejak 2016. Sampai saat ini beliau aktif menjadi pengajar, fasilitator, coach dan narasumber berkaitan dengan kepariwisataan, produk pariwisata, dan kebijakan kepariwisataan di beberapa kota di Nusantara.

Beberapa karya tulis bidang pariwisata yang pernah diterbitkan antara lain, Perencanaan Pariwisata Partisipatif 2010; Hutan Untuk Pariwisata Alam Sebuah Alternatif yang Prospektif 2011; Wisata Pedesaan Tepi Hutan Kalimantan Tengah Perspektif Potensi Peluang Dan Tantangan 2011; Pro Poor Tourism Pendekatan Desa Wisata 2013;

Masyarakat Lokal Pariwisata Adalah Benteng Pengaman 2014; Standardisasi Kompetensi dan Usaha Bidang Pariwisata 2013, Hutan Kota Dan Hutan Alami Pro Pariwisata Tinjauan Potensi Wisata di Kalimantan Tengah 2011; Pariwisata Berbasis Edukasi 2013; Model Pariwisata Era Green Planet 2014, Serta Pengemasan Potensi Destinasi Wisata 2013; Modul Diklat Pariwisata Dasar judul Pembangunan Kepariwisata Nasional diterbitkan Oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif tahun 2020; Modul Diklat Pariwisata Dasar judul Kode Etik Kepariwisata diterbitkan Oleh Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif tahun 2020; dan yang terbaru adalah Buku Model Pariwisata Pruden Dari Pemikiran Menuju Penerapan 2020.





PENULIS 2

Dr. Stepanus, S.Hut., M.P. lahir di Desa Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Pebruari 1972 dari orang tua Ayah Ihel Dinan dan Ibu Buwet Djaper. Anak ke 5 dari 6 bersaudara. Menempuh pendidikan SDN Bundar 1 tamat Tahun 1985 di Desa Bundar, SMPN 1 Bundar tamat Tahun 1988 di Desa

Bundar, SMAN 1 Buntok tamat Tahun 1991 di Buntok. DIII Teknisi Kehutanan Universitas Palangkaraya tamat Tahun 1994, S1 Kehutanan Jurusan Budi Daya Hutan Universitas PGRI Palangka Raya tamat Tahun 2002, S2 Kehutanan Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tamat Tahun 2007. S3 Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia tamat Tahun 2010. Tahun 1994 bekerja pada PT.Kayumas Group. Tahun 1995 bekerja pada Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Tahun 1996 sampai 1997 bekerja sebagai Guru pada SMA Swasta Awang Lapai. Tahun 1998 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Barito Selatan. Tahun 2000 sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan. Tahun 2011 sebagai Widyaiswara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2014 sebagai Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah, Fasilitator Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Fasilitator Bidang Konservasi Flora dan Fauna, Fasilitator Sistem Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan, Dosen Tamu pada Jurusan Kehutanan Universitas PGRI Palangka Raya, Dosen Tamu pada Program Magister Sains Manajemen Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya. Narasumber bidang Manajemen Sumberdaya Manusia diberbagai Seminar, Lokakarya, Diklat.

Karya Ilmiah yang pernah dibuat dan diterbitkan antara lain: 1. Trial Beberapa Media Tumbuh Terhadap Anakan Ramin (*Gonystylus Bancanus Kurz*), 2001; 2. Kajian Kemampuan Lahan Dan Tingkat Bahaya Erosi Dalam Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan, 2007; 3. Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. 2010. Dan karya Buku yang pernah dibuat dan diterbitkan antara lain: 1. Kepemimpinan Lintas Budaya Tahun 2013; 2. Komunikasi Dalam Organisasi Tahun 2013; 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun 2014; 4.Strategi Pemimpin Perubahan 2015; 5.Best Practice Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga memperoleh penghargaan prestasi antara lain: 1.Widyaiswara Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017 Peringkat IX; 2.Widyaiswara Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018 Peringkat VI; dan 3.Pegawai Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.



MODEL PARIWISATA PRUDEN

Dari Pemikiran Menuju Penerapan

Pariwisata yang baik tentunya memiliki destinasi yang berkualitas untuk dikunjungi, juga memiliki unsur komponen penopang yang kuat SDM, aksesibilitas dan amenitas, sehingga keberlanjutan destinasi tersebut dikunjungi oleh wisatawan tetap lestari. Pariwisata selalu berhubungan dengan ekonomi, kesejahteraan manusia dan juga alam semesta (ekosistem) pada tempat wisata. Ekosistem yang tertata dengan baik akan mengurangi risiko dan kerentanan, sementara ekosistem yang tidak dikelola dengan baik akan membahayakan manusia karena mempertinggi resiko terjadinya banjir, kekeringan, kegagalan panen pertanian atau penyakit.

Pemahaman bahwa sumber daya hutan sebagai satu bagian dari suatu ekosistem bentang alam, maka potensi ataupun daya dukung dari sumber daya hutan tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dalam konteks keterkaitannya dengan ekosistem lain yang dapat dipengaruhi dan atau dapat mempengaruhinya. Pemahaman ini secara gamblang dituangkan dalam buku ini. Menarik memang mengangkat sisi lain sebuah pariwisata pruden, sebuah pemikiran menuju penerapan.

Penasaran dengan buku ini, berawal dari sebuah kegelisahan yang tertuang dalam sebuah pemikiran (ide). Akhirnya, bisa berkarya dengan menuliskan ide tersebut sebagai langkah awal menerapkan pemikiran tersebut. Semangat menulis, menuangkan ide-ide berlian lagi Fransiskus Handoko, SST.Par., M.Sc. dan Dr. Stepanus, S.Hut., M.P. *"Menuliskah untuk menuangkan ide berlian Anda"*.

(Dian Ikha Pramayanti, S.Pt., M.Si., *Lecturer, Author, Editor, and Publisher Consultant*).



 **Dandelion Publisher**
 **dandelion_publisher**
 **0812 6111 765**
 **dandelionpublisher@gmail.com**
 **www.dandelionpublisher.com**



Provinsi Kalimantan Tengah

ISBN 978-623-6696-80-7



9 786236 696897